LAPORAN KINERJA
(LKj)
2025

DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DPUPRP
KAB.TANAH LAUT
KERJA KITA, PRESTASI BANGSA

©Subbag Perencanaan 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 10 April 2026

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

NIP. 19750412 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor - sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan **12 Program, 23 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan** dengan anggaran Belanja sebesar **Rp. 475,904,686,915.69**,- dengan realisasi **Rp. 461,440,924,899.00**,- atau sebesar **96,96 %** dan **Realisasi pendapatan Rp. 616.835.000**,- dari target **Rp. 550.000.000**,- atau sebesar **112,15 %.** Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2025 sudah sangat tinggi yaitu 117,01 %.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 10 April 2026

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST,M.M.

NIP. 19750412 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Dasar Hukum 2
D. Cascading Kinerja 4
E. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 5
F. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Petanahan Kabupaten Tanah Laut 12
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran 14
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya 18
I. Sistematika Penyajian 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **21**
A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 21
B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 21
C. Tujuan dan Sasaran Strategis 22
D. Indikator Kinerja Utama 25
E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 2023 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **30**
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 30
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 31
2. Analisa Capaian Kinerja 32
B. Akuntabilitas Keuangan 113

BAB IV PENUTUP **121**
A. Simpulan 121
B. Strategi Peningkatan Kinerja 121

LAMPIRAN

1. Capaian Kinerja Pejabat Struktural
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. IKU
4. Rencana Aksi
5. Pohon Kinerja
6. Cascading
7. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan

Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2022Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2022Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2022Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bati-Bati;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jorong;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Industri Jorong;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tambang Ulang ;

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Panyipatan;

18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kurau;

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bumi Makmur.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

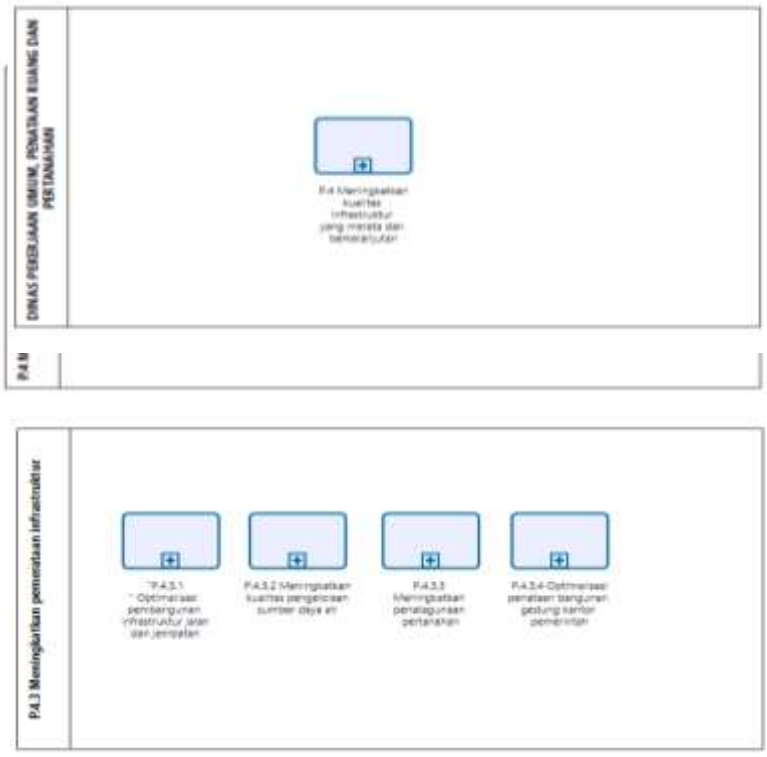

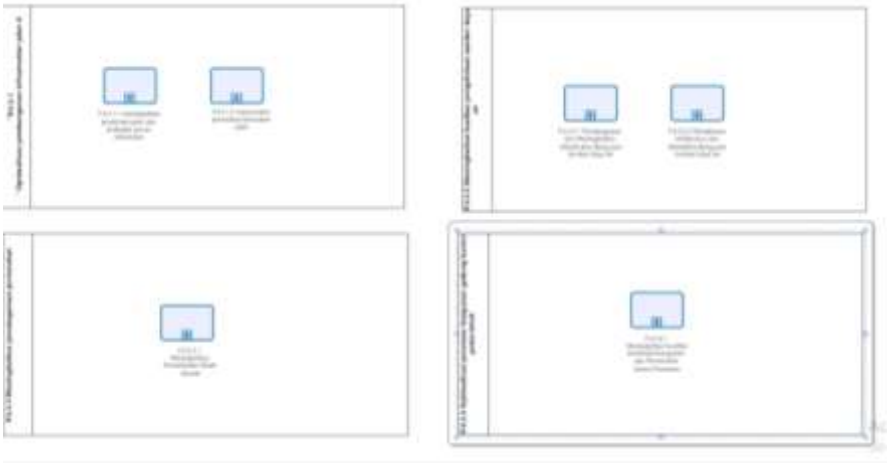

Gambar 1.
Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

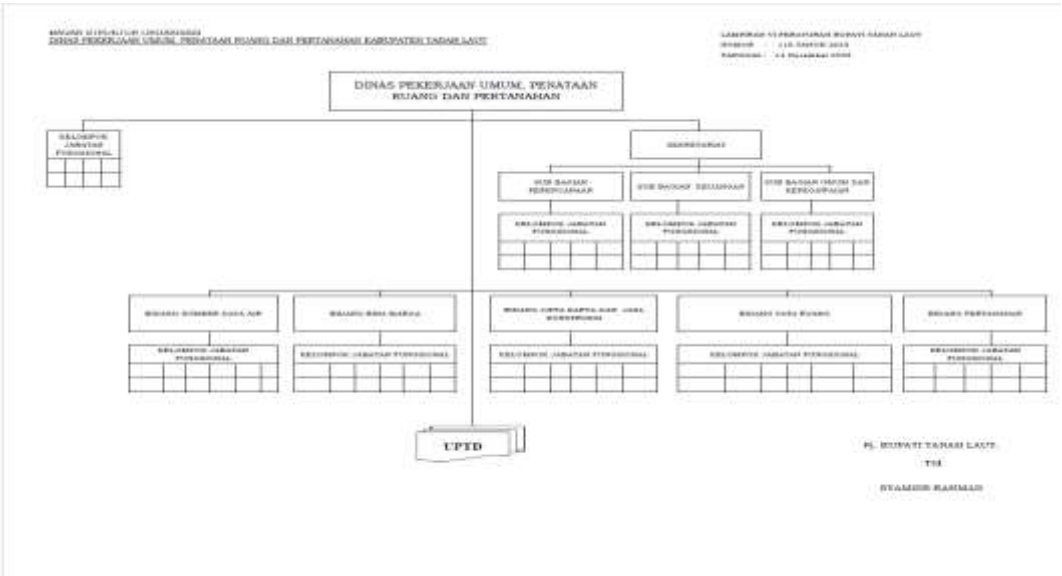

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika, urusan sttaistik, dan urusan persandian dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan , yakni:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
      1) perumusan kebijakan teknis Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan
      2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan
      3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan Bidang pertanahan
      4) pelaksanaan administrasi dinas
      5) pembinaan UPTD dinas
      6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
   a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
   b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
      1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
      2) pemberian pelayanan administrasi kepada Bidang lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

3) pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4) penyiapan peraturan perundang-undangan di Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
8) pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

a. urusan persuratan
b. urusan tata usaha

c. kearsipan
d. urusan aparatur sipil negara
e. urusan perlengkapan
f. rumah tangga
g. penataan barang milik negara.

6. Bidang Sumber Daya Air
   a. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air.
   b. Untuk melaksanakan tugas Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
      1) penyusunan Renja bidang sumber daya air
      2) perumusan kebijakan bidang sumber daya air
      3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang sumber daya air
      4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya air
      5) pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi, sungai, rawa dan pantai
      6) pelaksanaankebijakan irigasi, sungai, rawa dan pantai
      7) pelaksanaan kebijakan operasi dan pemeliharaan pengairan
      8) pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber daya air
      9) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya air
      10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
      11) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7. Bidang Bina Marga
   a. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang bina marga.
   b. Untuk melaksanakan tugas Bidang bina marga mempunyai fungsi:
      1) penyusunan Renja Bidang bina marga

2) perumusan kebijakan Bidang bina marga
3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang bina marga
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang bina marga;
5) pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan
6) pelaksanaan kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan
7) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang bina marga
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
   a. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanbidang cipta karya dan jasa konstruksi.
   b. Untuk melaksanakan tugas Bidang cipta karya dan jasa konstruksi mempunyai fungsi:
      1) penyusunan Renja Bidang cipta karya dan jasa konstruksi
      2) perumusan kebijakan Bidang cipta karya dan jasa konstruksi
      3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang cipta karya dan jasa konstruksi
      4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang cipta karya dan jasa konstruksi
      5) pelaksanaan kebijakan pengelolaan air bersih dan sanitasi
      6) pelaksanaan kebijakan tata bangunan
      7) pelaksanaan kebijakan bina jasa konstruksi
      8) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang sumber daya air
      9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9. Bidang Tata Ruang

a. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang tata ruang mempunyai fungsi:

1) penyusunan Renja Bidang tata ruang
2) perumusan kebijakan Bidang tata ruang
3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang tata ruang
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang tata ruang
5) pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang
6) pelaksanaankebijakan pemanfaatan tata ruang
7) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanbidang tata ruang
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

10. Bidang Pertanahan

a. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang pertanahan mempunyai fungsi:

1) penyusunan Renja Bidang pertanahan
2) perumusan kebijakan Bidang pertanahan;
3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang pertanahan
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pertanahan
5) perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah

6) pelaksanaan inventarisasi, pengendalian penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah
7) penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah
8) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat
9) pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah
10) pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
11) perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah
12) pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
13) penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong
14) perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah
15) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang pertanahan
16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 2.13 Simpulan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	**PERMASALAHAN PD**	**ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD**	**ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD**		**ISU STRATEGIS**
			NASIONAL	**REGIONAL**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Membangun infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada sungai utama di Kabupaten Tanah Laut dan daerah tangkapan air lainnya seperti daerah rawa dan tangkapan air lainnya	Kurangnya kinerja infrastruktur sumber daya air dan menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kurangnya kinerja infrastruktur sumber daya air dan menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kondisi Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan air yang kurang memadai
	Terbatasnya Anggaran penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang tersedia	Belum optimalnya pelayanan penyediaan sarana prasarana air bersih, termasuk masalah sanitasi dan drainase perairan	Konektifitas antar wilayah dalam mendukung aksesibilitas kawasan	Konektivitas antar Desa dalam mendukung aksesibilitas kawasan	Kualitas jalan dominan sudah rusak

	Kurang sumber air baku yang dapat di manfaatkan sebagai sumber untuk pengolahan air minum	Tantangan penyusunan tata ruang (review) terkait telah terlampauinya daya dukung air dan pengaturan daerah pemukiman yang layak serta komitmen konsistensi tata ruang	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Kualitas SDM jasa kontruksi yang rendah;
	Jauhnya jarak antar layanan masyarakat dengan sumber pengolahan air minum		Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder	Kurangnya Pengawasan dan Inspeksi, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terlatih	Belum terpenuhinya standar minimal pemenuhan fasilitas air minum seharihari
	Kurangnya kapasitas pengolahan air minum bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat untuk kepentingan infrastruktur		Ketidakpatuhan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci);
	Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki WC pada masyarakat perdesaan				Belum optimalnya penatagunaan tanah
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang				
	Tumpah tindih tanah Aset Pemerintah Daerah		Belum optimalnya Pendataan dan Pemanfaatan Tanah Aset Pemda	Masih kurangnya pengawasan terhadap aset tanah pemda	

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 76 orang yang terdiri dari 57 PNS, 10 orang PPPK penuh waktu, 79 orang PPPK paruh waktu dan 20 orang outsorcing dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	PPPK Paruh Waktu	**Total**		Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I				S2	S1	D-IV	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
7	42	8	-	10	79		12	46	2	24	1	58	3	20	**166**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai peta jabatan adalah 166 (Seratus enam puluh enam) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 166 (Seratus enam puluh enam) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

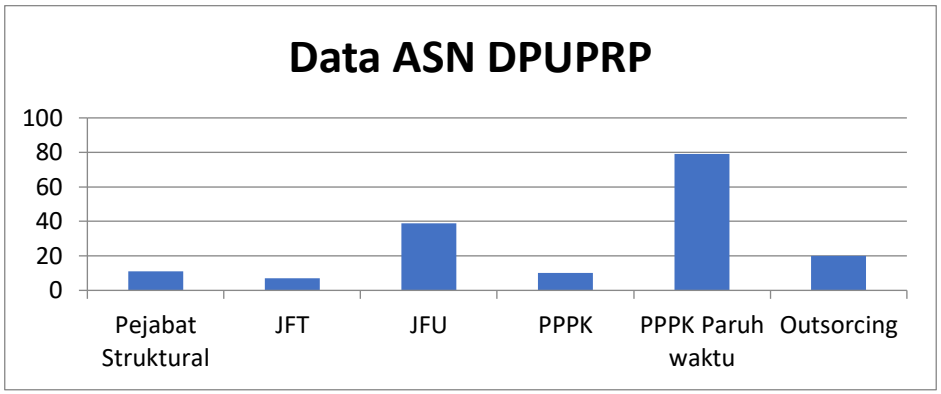

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 11 Pejabat struktural, 7 orang jabatan fungsional tertentu (JFT) 39 orang fungsional umum (JFU) dan 10 orang PPPK Penuh Waktu , 79 orang PPPK Paruh Waktu dan 20 orang outsorcing dengan jumlah keseluruhan 166 pegawai negeri sipil.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Pengendalian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 241 unit peralatan , 5 unit gedung kantor, mushalla dan 5 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 7 unit kendaraan roda empat, 1 unit roda enam dan kendaraan roda dua 15 unit.

Tabel 1.2
Program, dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No		Program / Kegiatan	Pagu
	1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.650.368.017.35
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.810.815.35
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.140.477.124,9
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.074.989,51
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	24.309.000

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.757.860,00
	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.339.500
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		209.655.870.218,7
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	209.655.870.218,7
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		29.319.031.261,96
	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	29.319.031.261,96
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		6.041.000.000
	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.041.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		23.572.645.028,58
	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.572.645.028,58
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		101.957.249.024,96
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	101.957.249.024,96
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		118.000.000
	1	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	118.000.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		85.886.420.934,71

	1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.080.330.926,51
	2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.406.500.779,55
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		2.902.990.013,14
	1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.320.236.187,1
	2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	479.113.826,04
	3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	103.640.000
10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		1.034.090.419,09
	1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.034.090.419,09
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		53.235.423
	1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	53.235.423
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		713.786.574,2
	1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000
	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.985.439,2
	3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.801.135
JUMLAH			475. 904.686.915,69

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/233 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.3
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	E Kinerja Bulan Agustus	Agustus 2025	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-
2	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	E Kinerja Bulan Agustus	Agustus 2025	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	-
3	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029	Oktober 2025	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-

	sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah	sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah				

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut
Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas PUPRP juga menjadi penggerak pemerataan infrastruktur, penjaga keteraturan ruang dan kepastian pertanahan yang menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia,

pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan termasuk dalam mendukung tujuan ketiga yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran yaitu Meningkatnya Pemerataan infrastuktur. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Pemerataan infrastuktur adalah Indeks Infrastruktur Daerah.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Meningkatnya pemerataan infrastruktur dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas
2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
3. Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemerataan infrastruktur		Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	49,55	54,21	55	57	59	60	60
	1.	Meningakatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Nilai)	73,65	74,77	75,69	76,5	77	78	78,3
	2.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)	99,91	90	95	94	95	96	97
	3.	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik (%)	50	51	51	52	52	53	53

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 048 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningakatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Nilai)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap x 30% + Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik x 30% + Persentase Rumah Tangga yang meangkses Air Minum aman x 30 % + Persentase Rumah Tangga yang meangkses Sanitasi aman x 5 % + Persentase panjang jalan yang berdrainase x 5 %.
2.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW merupakan hasil dari Jumlah pertimbangan teknis yang dibuat. x 100 % / Jumlah pertimbangan teknis
3.	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik (%)	Persentase Aset Tanah Pemda yg Termanfaatkan dg Baik merupakan hasil dari Jumlah aset tanah pemda yg dimanfaatkan / Jumlah aset tanah pemda .x100%

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Infrastruktur ke PUan yang berkualitas	Perbaikan infrastruktur untuk sistem penampungan air hujan skala besar	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	
2		Menyediakan sambungan rumah air minum dan air limbah di setiap perumahan	Peningkatan Infrastruktur SPAM	
3			peningkatan kapasitas pengolahan air limbah	
4		Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas	Peningkatan Kemantapan Jalan Kabupaten	
5	Meningkatkan pemanfaatan tanah daerah	Memfasilitasi proses mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat setempat.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Melakukan pelatihan dan sertifikasi dalam peningkatan SDM karyawan pertanahan, Menyediakan layanan mediasi , dan membangun pemahaman bersama.	
6	Implementasi NSPK Penataan Ruang sesuai Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan RTR	Peningkatan kualitas dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah	Penyusunan, penetapan, dan integrasi RTRW dan RDTR ke dalam sistem OSS- RBA	Mendukung kemudahan investasi daerah
7	Sinkronisasi penyusunan RTRW dan RDTR dengan kebijakan strategis nasional dan provinsi	Mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah dan pengendalian ruang	Pelaksanaan validasi dan legalisasi RDTR WP prioritas	Fokus WP Pelaihari, Bati-Bati, Takisung, dan Bumi Makmur

8	Penerapan sistem informasi geospasial dan SIMTARU	Penguatan pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan pembangunan	Pengembangan dan pemutakhiran sistem informasi penataan ruang	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial

No	WILAYAH	Arah Kebijakan RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	Ket
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tambang Ulang dan Batu Ampar)	Perbaikan infrastruktur untuk sistem penampungan air hujan skala besar	Perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bendungan serta embung untuk retensi dan air baku	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningakatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Nilai)	74,77	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)	90%	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	3	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik (%)	51%	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 3 sasaran di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 475. 904.686.915,69. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	209.655.870.218,7
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.319.031.261,96
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.572.645.028,58
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.957.249.024,96

		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.886.420.934,71
JUMLAH			**450.489.216.468,91**
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.990.013,14
JUMLAH			**2.902.990.013,14**
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.034.090.419,09
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*53.235.423*
JUMLAH			**1.087.325.842.09**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025-2029 terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 117,01 %.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 048 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan infrastruktur							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningakatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Nilai)	74,77	46,42	62,08 %	Sangat Rendah
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)	90%	98,05%	108,95%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	3	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik (%)	51%	96%	180%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						117,01%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 3 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 3 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN		RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*		**Realisasi** **---------- X 100%** **Target**
	Contoh: jumlah produksi partisipasi murni.	padi, angka	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*		**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,		**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian		

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya pemerataan infrastruktur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya pemerataan infrastruktur**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya pemerataan infrastruktur**	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	Nilai	54,21

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas
2) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
3) Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	-	80,16	74,77	74,77	46,49	62,08 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									62,08%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	74,77	46,49	62,08 %	78	59,60%

a. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan Nilai dari Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap x 30% + Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik x 30% +Persentase Rumah Tangga yang meangkses Air Minum Layak x 30 % + Persentase Rumah Tangga yang meangkses Sanitasi aman x 5 % + Persentase panjang jalan yang berdrainase x 5 %.

Perhitungan nya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Penghitungan Rumus Indikator Indeks Infrastruktur Umum

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Capaian (%)	Kali (%)	Angka Indeks (%)
1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	57,18	30	17,15
2	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	73,30	30	21,99
3	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum aman	21,50	30	4.83
4	Persentase rumah tangga yang mengajses sanitasi aman	3,1	5	0.15
5	Persentase panjang jalan berdrainase	15,05	5	0,75
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum				47.223

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum =	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap x 30% + Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik x 30% +Persentase Rumah Tangga yang meangkses Air Minum Layak x 30 % + Persentase Rumah Tangga yang meangkses Sanitasi aman x 5 % + Persentase panjang jalan yang berdrainase x 5 %

Tabel 3.1.4
Realisasi & Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 Pada Dinas PUPRP
(Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan kondisi Mantap	Persen	57,18	57,18	100
2	Panjang jalan	Km	1058,91	1058,91	100
3	Panjang Irigasi dalam kondisi Baik	Km	551,21	551,21	100
4	Panjang Irigasi	Km	753,940	753,940	100
5	Rumah Tangga Akses Air Minum Aman	Rumah Tangga	130.908	28.097	16,11
6	Rumah Tangga akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga	130.908	4.061	3,1
7	Rumah Tangga	Rumah Tangga	130.908	130.908	100
8	Panjang jalan yang ber drainase	Km	157,15	157,15	100

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

a. Persentase Jalan dalam kondisi mantap

kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2025 terealisasi sebesar 57,18% dari panjang jalan 1058,91 km atau terealisasi sepanjang 605.53 Km, dari yang ditargetkan sebesar 57,18% atau sepanjang 605.53 Km, sehingga dapat dilihat capaian kinerja jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 100%.

b. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2025 indikator jumlah panjang irigasi ditargetkan sepanjang 753,940 meter dan telah teralisasi sepanjang 551,21 Km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi adalah sebesar 100%. Dengan persentase panjang irigasi dalam kondisi baik sebesar 73,11%.

Jumlah panjang irigasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sama, sehinga tidak terjadi peningkatan/penurunan, hal ini sesuai dengan data inventarisasi bidang SDA, sehingga panjang irigasi sampai dengan tahun 2025 adalah tetap yaitu 753,940 KM. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya penambahan panjang irigasi baru, Bidang Sumber Daya Air lebih mengutamakan optimalisasi pada jaringan irigasi yang sudah terbangun sebelumnya.

c. Persentase rumah tangga yang mengakses air minum aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga berakses minum aman pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 130.908 tercapai sejumlah 28.097 Unit/KK sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga Akses Air Minum Aman pada tahun 16,11 %.

d. Persentase rumah tangga yang mengajses sanitasi aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses sanitasi aman pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 130.908 KK, dan telah terealisasi 4.061 KK, sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman pada tahun tercapai 3,1%.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebanyak 130.908/ KK.

e. Persentase panjang jalan berdrainase

Untuk indikator panjang jalan berdrainase pada tahun 2024 sejumlah 138 KM, kemudian pada tahun 2025 tercapai sepanjang 157,15 Km atau meningkat sebesar 3%.

Grafik 3.1.1

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021 – 2025

1) **Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Berikut analisa capaian **Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum** pada **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut** dalam lima tahun terakhir:

1. Gambaran Umum Perkembangan Indeks (2021–2025)

Tahun	Capaian Indeks	Perubahan Tahunan	Keterangan Tren
2021	46,81	-	Titik awal pengukuran periode
2022	49,9	+3,09	Kenaikan signifikan
2023	50,89	+0,99	Kenaikan moderat
2024	48,28	-2.61	Penurunan cukup tajam
2025	49,90	+1,52	Pemulihan kembali

2. Analisis Tren dan Dinamika Capaian

Periode Peningkatan (2021–2023)

Pada periode ini terjadi tren kenaikan yang cukup konsisten:

- Tahun 2022 meningkat **3,09 poin** dibanding 2021.
- Tahun 2023 kembali meningkat meskipun lebih moderat sebesar **0,99 poin**.

Hal ini mengindikasikan adanya:

- Peningkatan efektivitas pelaksanaan program infrastruktur.
- Percepatan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana.
- Perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Capaian tahun 2023 (50,89) menjadi **nilai tertinggi** dalam periode lima tahun.

Periode Penurunan (2024)

Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar **2,61 poin** menjadi 48,28.

Beberapa kemungkinan faktor penyebab:

- Refocusing atau penyesuaian anggaran.
- Keterlambatan pelaksanaan proyek.
- Perubahan indikator (IKU) atau metode penghitungan indeks.
- Faktor eksternal seperti kondisi cuaca ekstrim atau kendala teknis lapangan.

Penurunan ini cukup signifikan karena menghapus sebagian capaian peningkatan dua tahun sebelumnya.

Periode Pemulihan (2025)

Tahun 2025 menunjukkan perbaikan dengan kenaikan **1,52 poin** menjadi 49,80.

Ini menunjukkan:

- Upaya korektif terhadap capaian tahun 2024 mulai efektif.
- Stabilitas program kembali terjaga.
- Meskipun belum melampaui capaian tertinggi 2023, tren menunjukkan arah positif.

3. Analisis Rata-Rata dan Stabilitas

- **Rata-rata indeks 2021–2025:**
  (46,81 + 49,90 + 50,89 + 48,28 + 49,80) / 5 = **49,14**
- Rentang nilai tertinggi dan terendah:
  50,89 – 46,81 = **4,08 poin**

Fluktuasi masih dalam kategori **moderat**, belum menunjukkan volatilitas ekstrem, namun stabilitas jangka panjang masih perlu diperkuat.

4. Kesimpulan Strategis

1. Secara umum terjadi **tren peningkatan dibanding tahun awal (2021)**.
2. Tahun 2023 merupakan puncak kinerja.
3. Tahun 2024 menjadi titik koreksi yang perlu menjadi bahan evaluasi mendalam.
4. Tahun 2025 menunjukkan sinyal pemulihan yang positif.
5. Secara keseluruhan, performa lima tahun terakhir menunjukkan **kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat**, meskipun belum konsisten naik setiap tahun.

5. Rencana Aksi

- Melakukan evaluasi komprehensif terhadap faktor penurunan tahun 2024.
- Memperkuat monitoring dan pengendalian pelaksanaan proyek.
- Menjaga konsistensi kualitas perencanaan dan penganggaran.
- Mengidentifikasi indikator mana yang paling mempengaruhi fluktuasi indeks.
- Menyusun strategi peningkatan bertahap agar capaian dapat meningkat secara berkelanjutan sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.1.5
Realisasi & Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 Pada Dinas PUPRP
(Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

-	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan kondisi Mantap	Persen	57,18	57,18	100
2	Panjang jalan	Km	1058,91	1058,91	100
3	Panjang Irigasi dalam kondisi Baik	Km	551,21	551,21	100
4	Panjang Irigasi	Km	753,940	753,940	100
5	Rumah Tangga Akses Air minum aman	Rumah Tangga	130.908	28.097	16,11
6	Rumah Tangga akses Sanitasi aman	Rumah Tangga	130.908	4.061	3,1
7	Rumah Tangga	Rumah Tangga	130.908	130.908	100
8	Panjang jalan yang ber drainase	Km	157,15	157,15	100

1. Perbandingan Realisasi Dan Target
   a. Panjang Jalan Kondisi Mantap

      Pada tahun 2025 indikator Panjang Jalan kondisi Mantap ditargetkan sepanjang 605.53 km dan telah terealisasi sepanjang 605.53 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator Panjang Jalan kondisi Mantap adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan.

   b. Panjang Jalan

Pada tahun 2025 indikator jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan Kabupaten Tahun 2023 sepanjang 1058,91 km, namun pada tahun 2025 tidak ada penambahan jumlah panjang jalan, maka jumlah panjang jalan keseluruhan adalah tetap yaitu sepanjang 1058,91 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang jalan keseluruhan adalah sebesar 100%. Dengan persentase kondisi jalan mantap sebesar 57.18%.

c. Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2025 indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 551,21 Km dan telah terealisasi sepanjang 551,21 Km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 100%.

d. Panjang Irigasi

Pada tahun 2025 indikator jumlah panjang irigasi ditargetkan sepanjang 753,940 meter dan telah teralisasi sepanjang 551,21 Km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi adalah sebesar 100%. Dengan persentase panjang irigasi dalam kondisi baik sebesar 73,11%.

e. Rumah Tangga Akses Air Minum Aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga berakses Sanitasi aman pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 130.908 tercapai sejumlah 28.097 Unit/KK sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga Akses Air Minum Aman pada tahun 16,11%.

f. Rumah Tangga Akses Sanitasi aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses sanitasi aman pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 130.908 KK, dan telah terealisasi 4.061KK, sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman pada tahun tercapai 3,1%.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebanyak 130.908 KK.

h. Panjang Jalan Berdrainase

Untuk indikator panjang jalan berdraina di kabupaten tanah laut pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 157,15 KM, dan telah terealisasi 157,15 KM, sehingga dapat dilihat bahwa indikator panjang jalan berdrainase di kabupaten tanah laut tercapai 100%.

Tabel 3.1.6
Realisasi & Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur DaerahTahun 2024
Pada Dinas PUPRP
(Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan kondisi Mantap	Persen	1552,64	583,48	37,57
2	Panjang jalan	Km	1826,63	1058,91	55.1
3	Panjang Irigasi dalam kondisi Baik	Km	536.482,37	536.482,3778	100
4	Panjang Irigasi	Km	753.940,132	753.940,132	100
5	Rumah Tangga Akses Air Bersih	Rumah Tangga	65723	65723	100
6	Rumah Tangga akses Sanitasi Layak	Rumah Tangga	64422	64422	100
7	Rumah Tangga	Rumah Tangga	86569	86569	100
8	Panjang jalan yang ber drainase	Km	112,625	112,625	100

2. Perbandingan Realisasi Dan Realisasi Terkait

a. Panjang Jalan Kondisi Mantap

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi tahun 2022 sepanjang 1342,15 km atau sebesar 73,48%, tahun 2023 sepanjang 1272,07 Km atau sebesar 69,64% terhadap panjang jalan pada SK Jalan Kabupaten Tahun 2015 sepanjang 1826,63 km, Kemudian pada tahun 2024 kondisi jalan mantap sepanjang 583,48 Km atau sebesar 55,1% dan tahun 2025 kondisi jalan mantap sepanjang 605.53 Km atau sebesar 57,18% terhadap SK Jalan Kabupaten Tahun 2023 sepanjang 1058,91 km. Jadi capaian kinerja untuk tahun 2025 meningkat sebesar 2.08% dari tahun lalu.

b. Panjang Jalan

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 1058,91 Km, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan tetap dengan tahun sebelumnya 1058,91 Km.

c. Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 telah terbangun sepanjang 536,48 KM, kemudian pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 551,21 KM atau sebanyak 14,73 KM.

d. Panjang Irigasi

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak ada kenaikan target panjang irigasi, hal ini sesuai dengan hasil inventarisasi bidang SDA yaitu rigasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut adalah sepanjang 753,940 KM. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021-2025 lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas konstruksi pada jaringan yang sudah ada saat ini.

e. Rumah Tangga Akses Air Minum Bersih

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih pada tahun 2024 sejumlah 68.433 SR/KK, kemudian pada tahun 2025 tercapai sejumlah 71.971 SR/KK atau meningkat sebesar 4,07%. Sedang pada tahun 2025 indikator Rumah Tangga Akses Air Minum Bersih berubah menjadi Rumah Tangga Akses Air Minum Aman pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 130.908 tercapai sejumlah 28.147 Unit/KK sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga Akses Air Minum Aman pada tahun 21,50%.

f. Rumah Tangga Akses Sanitasi aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga berakses Sanitasi aman pada tahun 2024 sejumlah 67.850 Unit/KK , kemudian pada tahun 2025 tercapai sejumlah 72.845 Unit/KK atau meningkat sebesar 5,04%. Sedang pada tahun 2025 Indikator Rumah Tangga Akses Sanitasi Bersih berubah menjadi Rumah Tangga berakses Sanitasi aman pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 130.908 KK, dan telah terealisasi 4.061 KK,

sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman pada tahun tercapai 3,1%.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebanyak 86569 KK, lebih banyak dari jumlah tahun 2024 sebesar 130.908 KK.

h. Panjang Jalan (untuk drainase)

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan pada tahun 2015 yaitu sepanjang 1826,63 km dan tahun 2023 terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 1058,91 Km, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan berbeda dengan tahun sebelumnya 1826,63 km menjadi 1058,91 Km.

i. Panjang Jalan Berdrainase

Untuk indikator panjang Jalan berdrainase di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 terbangun sepanjang 112,615 Meter, kemudian pada tahun 2024 terbangun sepanjang 157,15 Kilo Meter atau bertambah sepanajng 44,635 Meter.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator " Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025 tercatat mencapai 49,80%, yang setara dengan 66,80% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 74,77%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 78%, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 63,80% dari target akhir Renstra. Organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan "Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas", Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan Peningkatan infrastruktur jalan yang berkualitas,

a. Peningkatan infrastruktur jalan yang berkualitas

Jalan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai prasarana dasar transportasi dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat. Keberadaan jalan memungkinkan terjadinya mobilitas orang dan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya secara aman, lancar, dan efisien. Dengan tersedianya jaringan jalan yang memadai, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

Selain itu, jalan berperan sebagai penghubung antar wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan. Jalan yang berfungsi dengan baik mampu membuka keterisolasian suatu daerah, meningkatkan aksesibilitas wilayah perdesaan, serta memperkuat keterkaitan antara kawasan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kondisi ini mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, memperlancar distribusi hasil pertanian, industri, dan perdagangan, serta meningkatkan daya saing wilayah.

Dalam konteks sosial dan pembangunan daerah, jalan juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jalan yang layak dan aman berkontribusi terhadap keselamatan berlalu lintas, mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi, serta mendukung integrasi sosial antar wilayah.

1. Pelaksanaan rehabilitasi jalan dan jembatan.

Pelaksanaan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan ruas jalan dan jembatan yang mengalami penurunan kondisi akibat faktor usia layanan, peningkatan beban lalu lintas, serta dampak bencana alam, sehingga memerlukan perbaikan agar tetap memenuhi standar teknis dan keselamatan.

Sepanjang tahun 2025, rehabilitasi jalan yang dilaksanakan sepanjang 10,163 Km dan rehabilitasi jembatan sebanyak 5 buah, yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, fungsi strategis jaringan jalan, serta keterkaitannya dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kondisi kemantapan jalan dan jembatan, memperlancar arus distribusi barang dan

jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan dengan aktivitas ekonomi produktif.

Kegiatan rehabilitasi jalan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Rehabilitasi Jalan Alur Damit

Gambar 3.2
Rehabilitasi Jembatan Damar Lima-Damit

2. Pelaksanaan perencanaan desain jalan dan jembatan

Tersusunnya dokumen perencanaan desain jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut yang sesuai standar teknis dan perencanaan desain telah mengacu pada standar teknis nasional, seperti standar geometrik jalan, perkerasan, struktur jembatan, serta ketentuan keselamatan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa proses

perencanaan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perencanaan desain jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut umumnya mampu diterjemahkan ke dalam pekerjaan konstruksi tanpa perubahan signifikan, sehingga meminimalkan revisi desain dan potensi keterlambatan pekerjaan. Desain yang matang berkontribusi pada ketepatan perhitungan volume pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini membantu mengurangi risiko pembengkakan biaya serta mendukung ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan. perencanaan desain juga telah dimasukkannya aspek keselamatan pengguna jalan serta pertimbangan lingkungan. Faktor Pendukung Keberhasilan pelaksanaan Perencanaan desain jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya ketersediaan data teknis dan survei lapangan yang cukup memadai. Kapasitas perencana dan konsultan yang memiliki kompetensi teknis. Koordinasi yang baik antara perencana, perangkat daerah terkait, dan pemangku kepentingan, Penggunaan pedoman dan standar desain yang jelas dan mutakhir.

Tantangan dalam perencanaan desain, yaitu keterbatasan data detail pada beberapa lokasi perencanaan, Perubahan kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya teridentifikasi saat survei awal, keterbatasan waktu perencanaan akibat penyesuaian jadwal penganggaran, perlunya penyesuaian desain terhadap dinamika kebutuhan masyarakat

Secara umum, pelaksanaan perencanaan desain jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai berhasil, ditunjukkan oleh kesesuaian desain dengan kondisi wilayah, kepatuhan terhadap standar teknis, serta keterlaksanaan desain pada tahap konstruksi. Perencanaan yang baik telah menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah.

Dari kegiatan perencanaan desain jalan yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan survei awal perencanaan
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor sejak tahap perencanaan
3. Mengintegrasikan teknologi perencanaan berbasis data dan pemodelan

4. Melakukan evaluasi desain secara berkala untuk peningkatan kualitas perencanaan di masa mendatang

Kegiatan Perencanaan Desain Jalan dan Jembatan selama Tahun 2025 adalah sebanyak 52 dokumen, sebagai berikut:

Gambar 3.3
Dokumen Perencanaan Jalan

Gambar 3.4
Dokumen Perencanaan Jembatan

3. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan

Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, didukung oleh ketersedian data teknis yang memadai. Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif karena koordinasi antar pemangku kepentingan terlaksana dengan baik serta didukung oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya

manusia sesuai kebutuhan. Hal tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target kinerja kegiatan sesuai indikator dan waktu yang telah ditetapkan.

Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Akses yang lebih baik memudahkan petani dan pelaku usaha dalam memasarkan hasil produksi serta menekan biaya logistik. Keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan juga tercermin dari meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Jalan dan jembatan yang layak mendukung mobilitas aparatur serta mempercepat respon layanan publik.

Sebagian besar pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan, baik dari segi struktur, bahan, maupun fungsi. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis, meskipun tetap diperlukan pemeliharaan rutin agar umur layanan infrastruktur tetap optimal. juga, tantangan yang masih dihadapi pada saat ini, antara lain Kondisi alam dan cuaca yang mempengaruhi proses konstruksi, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan berkala, kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas Kebutuhan peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan proyek.

kesimpulan secara umum, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya, diperlukan perhatian lebih pada aspek pemeliharaan, pengawasan, dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kegiatan Pembangunan Jalan selama Tahun 2025 adalah sepanjang 25,68 Km dan Jembatan sebanyak 19 buah, sebagai berikut:

Gambar 3.5
Pembangunan Jalan Kurau - Sei Rasau Kec. Kurau

Gambar 3.6
Pembangunan Jalan Kurau - Sei Rasau Kec. Kurau

Gambar 3.7
Pembangunan Jembatan Damar Lima - Damit Kec. Batu Ampar

4. Pembangunan drainase jalan

Pembangunan drainase jalan merupakan bagian penting dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan secara optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya genangan maupun kerusakan konstruksi jalan. Sistem drainase yang baik berperan besar dalam menjaga daya tahan jalan, meningkatkan keselamatan pengguna, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase pada ruas-ruas jalan strategis, khususnya pada kawasan dengan tingkat curah hujan tinggi dan potensi genangan. Pelaksanaan pembangunan drainase jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tata ruang wilayah, serta kebutuhan masyarakat setempat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Hingga tahun 2025, total capaian pembangunan drainase telah mencapai sepanjang 157.149 meter. Angka ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan guna mengurangi risiko genangan dan mendukung kenyamanan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, terdapat 144 pekerjaan yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan dan peningkatan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi. Jumlah pekerjaan tersebut menunjukkan intensitas dan fokus pembangunan yang signifikan dalam rangka memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan fungsi sistem drainase di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.8
Pembangunan Drainase Desa Kayu Abang - Kec. Tambang Ulang

Gambar 3.9
Pembangunan Drainase Desa Kayu Abang - Kec. Tambang Ulang

b. Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik

1. Optimalisasi jaringan irigasi sesuai desain

Optimalisasi jaringan irigasi merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan irigasi yang ada mampu menyalurkan air secara efisien, merata, dan sesuai dengan kebutuhan pertanian, sebagaimana telah direncanakan dalam desain teknis.

Upaya optimalisasi tersebut diawali dengan penyusunan dokumen dukungan teknis irigasi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Dokumen ini mencakup hasil survei, analisis kondisi eksisting, perhitungan kebutuhan air, serta rekomendasi teknis yang diperlukan untuk mendukung pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi jaringan irigasi.

Selanjutnya dilakukan pembangunan jaringan irigasi pada wilayah yang belum terlayani atau memiliki cakupan pelayanan yang belum optimal, dengan

mengacu pada standar teknis dan ketentuan yang berlaku. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan luas areal layanan irigasi serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Selain pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi kegiatan yang sangat penting untuk menjaga fungsi dan umur layanan infrastruktur. Kegiatan ini meliputi pengaturan distribusi air, pemeliharaan rutin, perbaikan ringan, serta penanganan kerusakan agar jaringan irigasi tetap berfungsi sesuai dengan desain.

Untuk jaringan yang mengalami penurunan kapasitas atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan saat ini, dilakukan peningkatan jaringan irigasi guna menyesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan dan kebutuhan pengguna. Sementara itu, rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat agar dapat kembali berfungsi secara optimal.

Sebagai pendukung keberlanjutan pengelolaan irigasi, dilakukan pula penguatan operasional kelembagaan pengelola irigasi, baik pada tingkat pemerintah maupun partisipasi petani melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A). Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan, koordinasi, serta peran aktif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, optimalisasi jaringan irigasi diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang andal dan berfungsi secara berkelanjutan.

1. Pembuatan DED Jaringan Irigasi

Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Jaringan Irigasi merupakan tahapan penting dalam mendukung peningkatan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik. DED disusun sebagai dokumen perencanaan teknis rinci yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi agar sesuai dengan kebutuhan lapangan, standar teknis, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pembuatan DED jaringan irigasi diawali dengan pengumpulan dan analisis data eksisting, meliputi kondisi jaringan irigasi yang ada, topografi, hidrologi, tata guna lahan, serta kebutuhan air irigasi. Data tersebut diperoleh melalui survei lapangan, pengukuran teknis, dan kajian terhadap dokumen perencanaan sebelumnya, guna memastikan perencanaan yang disusun akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dilakukan perencanaan teknis jaringan irigasi secara rinci, yang mencakup penentuan trase saluran, dimensi saluran, bangunan pelengkap irigasi, sistem pembagian dan pengaturan air, serta perhitungan kapasitas debit sesuai kebutuhan layanan irigasi. Perencanaan ini disusun agar jaringan irigasi dapat berfungsi secara optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari DED, disusun pula gambar rencana teknis, spesifikasi teknis, serta rencana anggaran biaya (RAB) yang menggambarkan kebutuhan biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses penganggaran, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Selain aspek teknis, pembuatan DED jaringan irigasi juga mempertimbangkan aspek operasional dan pemeliharaan, sehingga infrastruktur yang direncanakan mudah dikelola dan dipelihara oleh pengelola irigasi setelah pekerjaan konstruksi selesai. Dengan demikian, keberlanjutan fungsi jaringan irigasi dapat terjaga dalam jangka panjang.

Melalui penyusunan DED jaringan irigasi yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan pelaksanaan pembangunan irigasi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Gambar 3.10
Dokumen DED Jaringan Irigasi

Gambar 3.11
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa DIR Kandangan Baru

Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kandangan Baru di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja jaringan irigasi rawa agar mampu mengatur tata air secara optimal serta mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jaringan irigasi yang mengalami penurunan fungsi akibat sedimentasi, kerusakan bangunan irigasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Ruang lingkup kegiatan peningkatan jaringan irigasi rawa ini meliputi beberapa item pekerjaan utama. Salah satunya adalah pembuatan pintu air sebanyak 4 (empat) buah yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali muka air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun pengendalian genangan dan intrusi air pasang. Pintu air ini direncanakan dan dibangun sesuai dengan kebutuhan tata air rawa agar distribusi air dapat diatur secara efektif dan efisien.

Selain itu, dilakukan pembuatan jembatan box sebanyak 1 (satu) buah sebagai bangunan pelengkap irigasi yang berfungsi untuk menjaga konektivitas antarwilayah serta mendukung akses masyarakat dan operasional pemeliharaan jaringan irigasi. Jembatan box ini direncanakan dengan mempertimbangkan kapasitas aliran saluran agar tidak mengganggu fungsi hidraulis jaringan irigasi.

Kegiatan ini juga mencakup rehabilitasi jembatan ulin sebanyak 2 (dua) buah yang mengalami kerusakan dan penurunan fungsi. Rehabilitasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan akses serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pengelolaan jaringan irigasi rawa.

Untuk meningkatkan kapasitas saluran dan kelancaran aliran air, dilakukan normalisasi saluran sepanjang ±8,005 km. Normalisasi meliputi pekerjaan penggalian sedimentasi, perbaikan penampang saluran, dan penataan alur agar aliran air dapat mengalir dengan lancar sesuai dengan desain dan kebutuhan tata air rawa.

Sebagai upaya penguatan dan perlindungan jaringan irigasi, dilakukan pula timbunan tanggul menggunakan material base course. Pekerjaan ini bertujuan untuk memperkuat tanggul saluran, meningkatkan stabilitas, serta mencegah limpasan dan kerusakan akibat aliran air maupun pengaruh pasang surut.

Melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa DIR Kandangan Baru ini, diharapkan jaringan irigasi rawa dapat berfungsi secara optimal, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan.

.

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waduk Taksiung I

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Waduk Taksiung I di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan irigasi agar dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kondisi saluran irigasi eksisting pada lokasi kegiatan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan lapisan saluran, kebocoran, serta degradasi struktur yang berpotensi mengurangi efisiensi penyaluran air irigasi.

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi ini meliputi pelapisan saluran beton menggunakan bahan concrete canvas sepanjang ±300 meter. Pekerjaan pelapisan tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur saluran, mengurangi kehilangan air akibat rembesan, serta meningkatkan ketahanan saluran terhadap pengaruh erosi dan cuaca.

Penggunaan concrete canvas sebagai material pelapisan dipilih karena memiliki keunggulan dalam kemudahan pemasangan, waktu pengerjaan yang relatif singkat, serta daya tahan yang baik terhadap kerusakan. Material ini berfungsi sebagai lapisan beton fleksibel yang mampu melindungi saluran eksisting dan memperpanjang umur layanan jaringan irigasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ini, diharapkan saluran pada D.I. Waduk Taksiung I dapat kembali berfungsi secara optimal dalam menyalurkan air irigasi ke lahan pertanian secara efisien dan merata. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.12
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waduk Taksiung I

2. Optimalisasi normalisasi DAS sesuai standar

Penyusunan rencana teknis untuk kontruksi, pembangunan embung dan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan tanggul, tebing sungai, embung, dan penampung air lainnya; rehab embung dan tanggul sungai; pembangunan dan rehab bangunan perkuatan tebing; normalisasi atau restorasi sungai; pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA

1. Perencanan Embung

Perencanaan embung merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan infrastruktur sumber daya air guna mendukung ketersediaan air secara berkelanjutan, khususnya pada wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air pada musim kemarau. Embung berfungsi sebagai bangunan penampung air hujan dan limpasan permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, pertanian, serta keperluan masyarakat lainnya.

Laporan Pendahuluan Perencanaan Embung disusun sebagai tahap awal dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik. Laporan pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan perencanaan embung, ruang lingkup pekerjaan, serta metodologi yang akan digunakan dalam proses perencanaan.

Pada Laporan Pendahuluan Perencanaan Embung, disajikan kondisi awal lokasi rencana embung berdasarkan data sekunder dan hasil peninjauan awal lapangan, meliputi kondisi topografi, hidrologi, tata guna lahan, serta permasalahan ketersediaan air yang ada. Uraian ini menjadi dasar dalam menentukan pendekatan teknis dan alternatif perencanaan yang akan dikembangkan pada tahapan selanjutnya.

Laporan pendahuluan juga memuat rencana kegiatan survei dan pengumpulan data teknis yang diperlukan, seperti survei topografi, survei hidrologi, serta kajian lingkungan dan sosial. Selain itu, dijelaskan pula kerangka analisis perencanaan embung yang meliputi analisis kapasitas tampungan, debit andalan, sistem pelimpah, serta bangunan pelengkap embung.

Melalui penyusunan Laporan Pendahuluan Perencanaan Embung ini, diharapkan seluruh pihak terkait memperoleh pemahaman yang sama mengenai arah, tahapan, dan hasil yang akan dicapai dalam kegiatan perencanaan embung, sehingga proses perencanaan selanjutnya dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Gambar 3.13
Dokumen Perencanaan Embung

2. Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru - Kecamatan Pelaihari

Kegiatan Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan kapasitas embung sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian. Kondisi embung eksisting mengalami penurunan fungsi akibat pendangkalan dan kerusakan pada bagian tertentu, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi agar embung dapat kembali berfungsi secara optimal.

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi embung ini meliputi pekerjaan rehabilitasi pada area embung dengan ukuran panjang ±135 meter dan lebar ±41 meter. Kegiatan rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi fisik embung, meningkatkan kapasitas tampungan, serta menjaga stabilitas dan keamanan embung dalam menampung air.

Melalui kegiatan rehabilitasi ini, diharapkan embung Desa Kampung Baru mampu meningkatkan efektivitas penyimpanan air, mengurangi kehilangan air, serta mendukung pemanfaatan air secara berkelanjutan, terutama pada musim kemarau. Selain itu, rehabilitasi embung juga berperan dalam meningkatkan ketahanan air, mendukung kegiatan pertanian, dan memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar.

Dengan dilaksanakannya Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru ini, diharapkan fungsi embung dapat kembali optimal, umur layanan infrastruktur dapat diperpanjang, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.14
Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru - Kecamatan Pelaihari

3. Dokumen Perencanaan Normalisasi atau Restorasi Sungai

Kegiatan Perencanaan Normalisasi atau Restorasi Sungai dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir sebagai satu kesatuan proses perencanaan teknis pengelolaan sungai. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penanganan sungai secara efektif, aman, dan berkelanjutan.

Laporan Pendahuluan disusun sebagai tahap awal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan perencanaan, ruang lingkup pekerjaan, serta metodologi yang akan digunakan. Pada tahap ini disajikan gambaran kondisi awal sungai berdasarkan data sekunder dan peninjauan lapangan awal, meliputi kondisi alur sungai, kapasitas tampung, sedimentasi, kondisi tebing, serta permasalahan banjir dan degradasi lingkungan. Laporan pendahuluan juga menjelaskan rencana survei dan pengumpulan data teknis, seperti survei topografi, hidrologi, hidraulika, dan lingkungan, yang menjadi dasar dalam tahapan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data dan hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya disusun Laporan Akhir yang memuat hasil perencanaan secara lengkap dan rinci. Laporan akhir menyajikan kondisi eksisting sungai secara detail, hasil analisis teknis, serta konsep dan alternatif perencanaan normalisasi atau restorasi sungai. Perencanaan meliputi penataan alur sungai, peningkatan kapasitas alur, pengendalian sedimentasi, perlindungan tebing, serta penguatan fungsi ekologis sungai dengan pendekatan yang berwawasan lingkungan.

Laporan akhir juga dilengkapi dengan perencanaan teknis rinci berupa perhitungan desain, gambar rencana, spesifikasi teknis, serta rencana anggaran biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan konstruksi. Selain itu, disampaikan pula rekomendasi pelaksanaan serta aspek operasi dan pemeliharaan guna menjamin keberlanjutan fungsi sungai setelah pekerjaan dilaksanakan.

Melalui penyusunan Laporan Pendahuluan hingga Laporan Akhir Perencanaan Normalisasi atau Restorasi Sungai ini, diharapkan penanganan sungai dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi risiko banjir, meningkatkan fungsi sungai, serta mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar sungai.

Gambar 3.15
Dokumen Perencanaan Normalisasi atau restorasi Sungai

4. Normalisasi Sungai atau Restorasi Sungai

Kegiatan Normalisasi atau Restorasi Sungai di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan sebagai upaya pengendalian banjir sekaligus peningkatan fungsi sungai dalam mendukung sistem irigasi. Sungai memiliki peran strategis sebagai saluran alami pengaliran air, sehingga diperlukan penanganan yang terencana dan berkelanjutan agar kapasitas alur sungai tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan tata air wilayah.

Normalisasi sungai dilakukan untuk meningkatkan kapasitas alur sungai melalui penataan kembali penampang sungai, pengendalian sedimentasi, serta perbaikan kondisi tebing sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar aliran air, mengurangi risiko genangan dan banjir pada musim hujan, serta menjaga stabilitas alur sungai. Dengan kapasitas sungai yang memadai, debit banjir dapat dialirkan dengan lebih aman tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selain normalisasi, pendekatan restorasi sungai juga diterapkan pada lokasi tertentu dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan keberlanjutan. Restorasi sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami sungai melalui penataan bantaran, perlindungan tebing, serta penguatan vegetasi di sekitar sungai.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sungai sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan irigasi, kegiatan normalisasi atau restorasi sungai berperan penting dalam menjamin ketersediaan air baku bagi jaringan irigasi, khususnya pada musim kemarau. Sungai yang berfungsi dengan baik akan mendukung distribusi air irigasi secara lebih stabil dan merata, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Laut.

Melalui pelaksanaan kegiatan normalisasi atau restorasi sungai yang terencana dan terintegrasi, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sungai yang andal, mampu mengendalikan banjir, meningkatkan fungsi irigasi, serta mendukung pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.16
Normalisasi Sungai atau Restorasi Sungai

3. Optimalisasi perlindungan pantai

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pantai

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pantai dilaksanakan sebagai tahap perencanaan awal dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendali

daya rusak air yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan rencana teknis mencakup kegiatan pengumpulan dan analisis data eksisting, meliputi kondisi hidrologi, hidraulika, geologi, topografi, serta karakteristik wilayah rawan banjir, lahar, dan abrasi pantai. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun konsep dan alternatif penanganan teknis berupa bangunan pengendali banjir, pengendali lahar, dan pengaman pantai, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, efektivitas fungsi, serta kemudahan operasi dan pemeliharaan.

Selain rencana teknis, kegiatan ini juga meliputi penyusunan dokumen lingkungan hidup, seperti UKL-UPL atau AMDAL, sesuai dengan skala dan karakteristik kegiatan konstruksi yang direncanakan. Dokumen lingkungan hidup disusun untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan konstruksi, serta merumuskan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta melibatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana konstruksi yang disusun dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di kemudian hari.

Melalui kegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup ini, diharapkan pelaksanaan konstruksi pengendali banjir, lahar, dan pantai dapat berjalan secara terencana, tepat sasaran, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu mengurangi risiko bencana, melindungi kawasan permukiman dan infrastruktur, serta mendukung pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan.

2. Bangunan Pengaman Pantai Desa Muara Kintap - Kecamatan Kintap

Kegiatan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan sebagai upaya

perlindungan kawasan pesisir, khususnya kampung nelayan yang berada di sekitar muara sungai, dari ancaman abrasi, gelombang laut, dan arus pasang surut. Kawasan ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dinamika perairan, sehingga diperlukan bangunan pengaman pantai yang andal dan berkelanjutan.

Bangunan pengaman pantai yang direncanakan dan dibangun berupa struktur jetty dengan menggunakan material batu gunung, dengan panjang kurang lebih 130 meter. Struktur jetty ini berfungsi untuk mengarahkan dan meredam energi gelombang serta arus laut di sekitar muara sungai, sehingga dapat mengurangi proses abrasi dan menjaga stabilitas garis pantai.

Penggunaan material batu gunung dipilih karena memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik terhadap pengaruh gelombang dan kondisi lingkungan laut. Perencanaan dan pelaksanaan struktur jetty dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hidrodinamika perairan, karakteristik pantai, serta aspek keselamatan dan keberlanjutan fungsi bangunan.

Dengan dibangunnya bangunan pengaman pantai berupa jetty ini, diharapkan kampung nelayan di Desa Muara Kintap dapat terlindungi dari kerusakan akibat abrasi dan gelombang laut. Selain itu, bangunan ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas nelayan, meningkatkan rasa aman masyarakat pesisir, serta menjaga keberlanjutan lingkungan pantai di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.16
Bangunan Pengaman Pantai Desa Muara Kintap - Kecamatan Kintap

3. Bangunan Pengaman Pantai Desa Kuala Tambangan - Kec. Takisung

Kegiatan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan sebagai upaya perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan akibat gelombang serta arus laut. Kawasan pesisir Desa Kuala Tambangan merupakan wilayah permukiman nelayan yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap dinamika pantai, sehingga diperlukan penanganan infrastruktur pengaman pantai yang andal dan berkelanjutan.

Bangunan pengaman pantai yang direncanakan dan dibangun berupa struktur jetty dengan menggunakan material batu gunung, dengan panjang kurang lebih 260 meter. Struktur jetty ini berfungsi untuk meredam dan mengarahkan energi gelombang serta arus laut, sehingga dapat mengurangi laju abrasi pantai dan melindungi area permukiman nelayan yang berada di sepanjang pesisir pantai.

Penggunaan material batu gunung dipilih karena memiliki kekuatan, stabilitas, dan ketahanan yang baik terhadap pengaruh gelombang dan kondisi lingkungan laut. Perencanaan struktur jetty dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hidrodinamika perairan, karakteristik pantai setempat, serta aspek keselamatan dan keberlanjutan fungsi bangunan.

Dengan dibangunnya bangunan pengaman pantai berupa jetty ini, diharapkan area permukiman nelayan di Desa Kuala Tambangan dapat terlindungi dari ancaman abrasi dan kerusakan pantai. Selain itu, bangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat pesisir, mendukung keberlanjutan aktivitas nelayan, serta menjaga kelestarian kawasan pesisir di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.17
Bangunan Pengaman Pantai Desa Kuala Tambangan - Kec. Takisung

4. Peningkatan kapasitas sumber air baku

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku serta Pembangunan Sumber Air Tanah untuk Air Baku dilaksanakan sebagai tahap perencanaan dalam rangka mendukung penyediaan air baku yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup sebagai dasar pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan rencana teknis meliputi pengumpulan dan analisis data eksisting, antara lain kondisi hidrogeologi, potensi air tanah, kualitas dan kuantitas sumber air, serta kondisi lingkungan sekitar lokasi rencana. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun konsep dan alternatif perencanaan konstruksi air tanah dan air baku, termasuk perencanaan pembangunan sumber air tanah berupa sumur produksi, bangunan pelengkap, serta sistem penyaluran air baku.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga mencakup penyusunan dokumen lingkungan hidup, seperti UKL-UPL atau AMDAL sesuai dengan skala dan karakteristik kegiatan. Dokumen lingkungan hidup disusun untuk mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan akibat kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan air tanah, serta merumuskan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah.

Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek konservasi air tanah, keseimbangan lingkungan, serta kebutuhan jangka panjang masyarakat. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian rencana dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan tata ruang wilayah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pembangunan sumber air tanah untuk air baku dapat dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan ketersediaan air baku, mendukung pelayanan air bersih, serta menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1. Dokumen Survei Investigasi & Desain Peningkatan Sumber Air Baku Desa Jorong - Kecamatan Jorong

Gambar 3.18
Dokumen Peningkatan kapasitas Sumber Air Baku

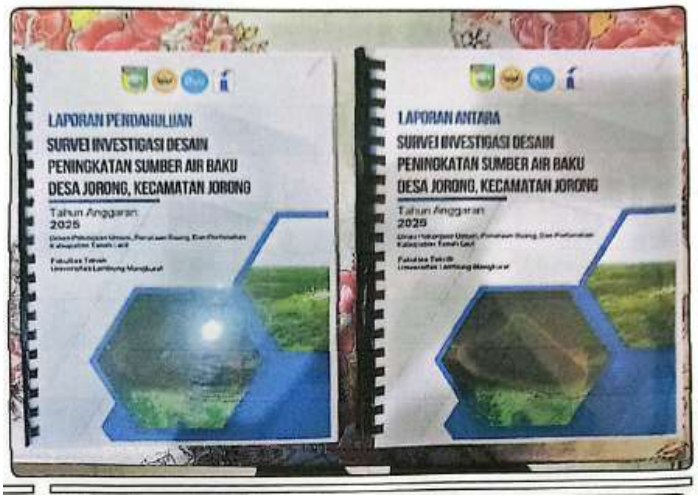

Kegiatan Penyusunan Dokumen Survei, Investigasi, dan Desain (SID) Peningkatan Sumber Air Baku Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan sebagai tahap perencanaan teknis dalam rangka mendukung penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sumber air baku yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Jorong serta mendukung pengembangan kawasan industri Jorong.

Rencana peningkatan sumber air baku tersebut direncanakan melalui pembangunan embung dengan luasan sekitar ±15 hektare dan volume tampungan kurang lebih 450.000 m^3. Embung ini dirancang sebagai sarana penampungan air yang berfungsi untuk menjamin ketersediaan air baku sepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau, serta meningkatkan ketahanan air wilayah.

Penyusunan dokumen SID diawali dengan kegiatan survei dan investigasi lapangan, meliputi survei topografi, hidrologi, geologi, dan lingkungan pada lokasi rencana embung. Data hasil survei dan investigasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis teknis untuk menentukan kapasitas tampungan, elevasi muka air, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, serta sistem distribusi air baku.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya disusun desain teknis embung dan bangunan pendukungnya, yang dilengkapi dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, serta rencana anggaran biaya (RAB). Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan konstruksi, fungsi operasional, serta kemudahan operasi dan pemeliharaan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan dokumen SID ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai mitra akademik. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan yang berbasis kajian ilmiah dan penerapan kaidah teknis yang tepat, sehingga dokumen SID yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan akademis.

Dengan tersusunnya Dokumen SID Peningkatan Sumber Air Baku Desa Jorong ini, diharapkan pembangunan embung dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Desa Jorong serta memberikan kontribusi dalam mendukung pasokan air baku bagi kawasan industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut.

5. Peningkatan akses air minum dan sanitasi aman

a) Peningkatan kualitas layanan SPAM Rumah Tangga

Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem penyediaan air minum, pembangunan spam perpipaan dan spam jaringan bukan perpipaan, perluasan spam jaringan perpipaan, optimalisasi spam jaringan bukan perpipaan

Peningkatan kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) rumah tangga merupakan upaya strategis pemerintah daerah Kab. Tanah Laut dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Ketersediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Upaya peningkatan kualitas layanan SPAM rumah tangga dilakukan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana air minum, serta penguatan pengelolaan dan pelayanan

kepada masyarakat. Selain itu, optimalisasi operasional dan pemeliharaan SPAM terus dilakukan guna menjamin distribusi air minum yang lebih merata dan andal.

Gambar 3.19
Peningkatan SPAM Jl. A. Yani - Kecamatan Pelaihari

Gambar 3.20
Peningkatan SPAM Jl. Menuju Puro - Kecamatan Pelaihari

Melalui komitmen pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, peningkatan jaringan perpipaan, pembangunan sarana dan prasarana SPAM, serta optimalisasi sistem yang sudah ada, akses air minum aman terus mengalami peningkatan secara bertahap. Upaya ini didukung oleh sinergi pendanaan serta perencanaan yang berkelanjutan guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Hingga tahun 2025, capaian akses layanan SPAM telah mencapai 82,79% atau sekitar 72.021 Kepala Keluarga (KK). Pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sendiri, terdapat 4 Paket pekerjaan pembangunan/peningkatan SPAM yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan perluasan layanan dan peningkatan kualitas distribusi air minum. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

b) Peningkatan kualitas pengelolaan limbah

Optimalisasi pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman.

Peningkatan kualitas pengelolaan limbah merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan limbah yang baik berperan dalam mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah timbulnya penyakit, serta menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan layak huni.

Pemerintah daerah Kab. Tanah Laut melaksanakan berbagai upaya peningkatan pengelolaan limbah melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan limbah, peningkatan layanan pengangkutan dan pengolahan, serta penguatan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat juga terus didorong agar pengelolaan limbah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar 3.21
Peningkatan kualitas pengelolaan limbah

Berbagai upaya telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi pembangunan dan rehabilitasi jamban sehat, peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik, pengembangan sanitasi berbasis masyarakat, serta penguatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam percepatan peningkatan akses sanitasi.

Hingga tahun 2025, capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Tanah Laut telah mencapai 78,78% atau sekitar 72.485 Kepala Keluarga (KK). Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi melaksanakan 12 pekerjaan sanitasi yang mencakup pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sanitasi sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah.

6. Peningkatan penataan bangunan gedung kantor pemerintah
   a) Peningkatan kompetensi SDM jasa konstruksi

      Untuk Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi SDM Pelaku Jasa Konstruksi, dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan konstruksi

Gambar 3.22
Rapat Penguatan Kompetensi SDM Bidang Infrastruktur
(Pengawasan dan Evaluasi Proyek)

b) Peningkatan ketepatan penyelenggaraan konstruksi

Peningkatan ketepatan penyelenggaraan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berfokus pada tiga pilar utama: tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

Gambar 3.23
Peningkatan ketepatan penyelenggaraan konstruksi

a) Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah berkualitas

Dilaksanakannya upaya agar gedung milik daerah yang dibangun dengan baik sejak awal agar dapat berfungsi maksimal dengan biaya yang paling efisien dalam jangka panjang.

Pembangunan Lapangan Basket Indoor

Gambar 3.24
Rapat Penguatan Kompetensi SDM Bidang Infrastruktur

Gambar 3.25
Peningkatan Bangunan Gedung Lapangan Pertasi Kencana

Gambar 3.26
Pembangunan Lapangan Tenis Indoor

Gambar 3.27
Pembangunan Gedung Gym

Gambar 3.28
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Pelaihari

Pada tahun 2025, jumlah total gedung kantor yang berhasil dibangun mencapai 59 unit. Selain itu, terdapat 19 gedung kantor yang telah direhabilitasi guna meningkatkan kualitas dan fungsinya.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Perencanaan Teknis yang Baik

   Proses penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terukur, berbasis data kondisi lapangan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD).

2. Dukungan Anggaran

   Dukungan anggaran dengan ketersediaan dana yang memadai, tepat waktu, dan dikelola secara efektif serta efisien untuk membiayai seluruh program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan dapat berjalan sesuai rencana, target, dan standar mutu yang ditetapkan.

3. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia pada Bidang Bina Marga memiliki kompetensi, keterampilan, pengalaman, serta komitmen kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Bina Marga sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai standar teknis yang ditetapkan.

4. Pengawasan dan Pengendalian

   Proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bidang Bina Marga untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, spesifikasi teknis, jadwal, serta anggaran, sekaligus melakukan tindakan korektif apabila terdapat kendala teknis, monitoring rutin lapangan sebagai *quality control* pekerjaan konstruksi, serta melakukan rapat evaluasi berkala progres fisik dan keuangan.

5. Koordinasi dan Kolaborasi

   Proses kerja sama dan sinergi antar unit kerja, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, guna memastikan keterpaduan kegiatan, menghindari tumpang tindih, serta koordinasi antara meningkatkan efektivitas dan menyelaraskan tugas demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

6. Perencanaan Teknis yang dikelola dengan baik

   Perencanaan teknis yang dikelola dengan baik merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan dan pengelolaan sistem air secara berkelanjutan. Perencanaan ini tidak hanya berisi perhitungan teknis semata, tetapi merupakan proses terstruktur yang menggabungkan data, analisis, standar teknis, proyeksi kebutuhan, serta manajemen risiko menjadi satu kerangka keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.Perencanaan teknis yang baik selalu diawali dengan pengumpulan dan verifikasi data yang memadai dengan menerapkan standar, norma, pedoman, dan kriteria yang berlaku dan di integrasikan dengan rencana tata ruang, rencana pengelolaan wilayah sungai, rencana irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan konservasi DAS.

7. Pendanaan & Pembiayaan yang tepat.

   Pendanaan dan pembiayaan yang tepat dalam program pengelolaan sumber daya air merupakan faktor kunci yang menentukan keberlanjutan layanan, keandalan infrastruktur, dan efektivitas pengelolaan secara keseluruhan. Program SDA umumnya bersifat jangka panjang, padat modal, dan berisiko tinggi, sehingga memerlukan strategi pembiayaan yang terencana, proporsional, dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada operasi, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas sistem. pada akhirnya untuk pelaksanaaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur SDA dapat berjalan sesuai rencana, target, dan standar mutu yang ditetapkan.

8. Sumber Daya Manusia yang sesuai kebutuhan dan berkualitas

   Jika Sumber Daya Manusia yang dimiliki bidang SDA sesuai dengan kebutuhann maka akan mendorong kinerja Pengelolaan SDA serta Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penggerak utama keberhasilan program pengelolaan sumber daya air, karena seluruh siklus pengelolaan—mulai dari perencanaan, perancangan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, hingga evaluasi—sangat bergantung pada kompetensi dan integritas personel yang menjalankannya. Infrastruktur dan teknologi yang baik tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung tenaga profesional yang memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan etika kerja yang kuat.

9. Infrastruktur & Operasi Teknis yang baik

Infrastruktur dan operasi teknis yang baik merupakan pendorong keberhasilan program pengelolaan sumber daya air, karena keduanya menentukan seberapa andal sistem mampu mengatur, menyimpan, mengalirkan, dan mengendalikan air sesuai kebutuhan serta tingkat risiko yang dihadapi. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan air, tetapi oleh kesesuaian desain, mutu konstruksi, kesiapan operasi, dan konsistensi pemeliharaan sepanjang umur layanan.infrastruktur yang dirancang dan dibangun dengan benar, dioperasikan berdasarkan prosedur teknis, serta dipelihara secara konsisten akan menghasilkan sistem pengelolaan sumber daya air yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

10. Tata Kelola & Kelembagaan yang baik

    Tata kelola dan kelembagaan yang baik sangat berpengaruh karena menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan operasional, bagaimana kewenangan dibagi, serta bagaimana koordinasi antar pihak dijalankan.Koordinasi antar sektor harus dilakukan dalam pengelolaan air yang berkaitan langsung dengan tata ruang, pertanian, lingkungan hidup, energi, dan kebencanaan

11. Partisipasi Sosial Masyarakat yang baik

    Air adalah sumber daya bersama yang pemanfaatannya melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Keberhasilan program SDA tidak hanya ditentukan oleh kekuatan teknis dan infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap sistem yang dibangun dan aturan yang diterapkan.

    Peran masyarakat secara luas mencakup pengawasan sosial, perlindungan sumber air, serta dukungan terhadap program konservasi. Partisipasi masyarakat dalam menjaga sempadan sungai, tidak merusak bangunan air, dan mendukung kegiatan rehabilitasi lingkungan memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan fungsi sistem. Keterlibatan komunitas juga memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap kejadian ekstrem seperti banjir dan kerusakan jaringan.

    Dalam konteks daerah irigasi, peran aktif kelembagaan petani pemakai air yakni P3A, GP3A, dan IP3A menjadi faktor pengungkit utama kinerja layanan. P3A berperan langsung di tingkat jaringan tersier dalam mengatur pembagian air, operasi pintu tersier, serta pemeliharaan ringan saluran. GP3A berfungsi mengoordinasikan beberapa P3A

pada tingkat jaringan sekunder, menyelaraskan distribusi antar wilayah layanan, dan menjadi penghubung dengan pengelola teknis pemerintah. IP3A berperan pada tingkat yang lebih luas dalam koordinasi antar daerah irigasi atau sistem yang lebih besar, termasuk dalam forum perencanaan dan evaluasi kebijakan irigasi.

12. Sistem Informasi & Teknologi tangguh dan terintegrasi

    Sistem informasi dan teknologi yang baik berperan besar dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sumber daya air karena memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Dukungan teknologi membuat proses perencanaan, operasi, dan pengendalian risiko air menjadi lebih terukur dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan. contoh nya adalah penggunaan Jaringan pos hujan, AWLR, telemetri Basis data SDA terintegrasi (GIS, dashboard).Early warning system banjir & kekeringan. Jika tersedia lengkap dan berfungsi baik serta terintegrasi maka akan sangat mendorong Keberhasilan program SDA

13. Transformasi Digital dan Modernisasi Teknis

    Faktor utama pendorong keberhasilan saat ini adalah adopsi teknologi informasi dalam setiap tahapan konstruksi. Implementasi Building Information Modeling (BIM) dan sistem monitoring memungkinkan pengawasan proyek dilakukan secara real-time, sehingga potensi deviasi mutu dan waktu dapat dideteksi serta dimitigasi sejak dini. Digitalisasi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

14. Kompetensi SDM dan Standarisasi Profesionalisme.

    Dibalik gedung yang kokoh dan sistem sanitasi yang handal, terdapat SDM yang kompeten. Penguatan kinerja didorong oleh percepatan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) bagi para penyedia jasa dan pengawas internal. Dengan personil yang tersertifikasi, standar prosedur operasional (SOP) bukan lagi sekadar dokumen, melainkan praktik lapangan yang menjamin keselamatan kerja (K3) dan ketepatan spesifikasi bangunan.

15. Sinergi Kolaboratif dan Tata Kelola yang Akuntabel.

    Keberhasilan Bidang Cipta Karya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Faktor pendorong yang tidak kalah penting adalah terciptanya kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, penyedia jasa (kontraktor/konsultan), dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Melalui tata kelola kontrak yang transparan dan pendampingan hukum yang tepat, risiko sengketa dapat diminimalisir, sehingga keberlanjutan proyek tetap terjaga hingga tahap operasional dan pemeliharaan.

16. Komitmen Pemerintah Daerah.

    Adanya dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program.

17. Ketersediaan Anggaran

    Dukungan pendanaan melalui APBD maupun sumber pembiayaan lainnya memungkinkan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.

18. Sinergi lintas sektor dan stakeholder

    Koordinasi yang baik antara OPD teknis, kecamatan, desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

19. Partisipasi dan dukungan masyarakat

    Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Keterbatasan anggaran

   Kondisi dimana ada efisiensi anggaran sehingga alokasi dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan program dan kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan, peningkatan, maupun pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Cuaca ekstrem

   kondisi alam yang tidak menentu atau berada di luar kondisi normal, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta mempengaruhi waktu, dan keselamatan kerja.

3. Keterbatasan Anggaran

   Faktori ini disebut utama karena seluruh tahapan pengelolaan—mulai dari pengumpulan data, perencanaan teknis, pembangunan infrastruktur, operasi, pemeliharaan, hingga monitoring sangat bergantung pada dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Ketika alokasi dana tidak cukup atau tidak stabil, kualitas pelaksanaan program cenderung menurun dan tujuan layanan sulit tercapai. Pada tahap perencanaan, keterbatasan anggaran sering menyebabkan pengumpulan data dan investigasi teknis tidak dilakukan secara lengkap. Dalam pembangunan; peningkatan dan rehab infrastruktur, keterbatasan dana dapat menurunkan mutu hasil pekerjaan. Spesifikasi teknis berpotensi diturunkan, tahapan pekerjaan dipadatkan, atau sebagian komponen penting ditunda. Pada operasi dan pemeliharaan, keterbatasan anggaran OP menyebabkan inspeksi rutin, perawatan berkala, kalibrasi peralatan, pengerukan sedimentasi, dan perbaikan minor tidak terlaksana tepat waktu.

   Keterbatasan anggaran juga membatasi penguatan sumber daya manusia dan teknologi. Pelatihan teknis, sertifikasi, pengadaan peralatan monitoring, serta pengembangan sistem informasi sering ditunda.

4. Cuaca Ektrim

   Faktor cuaca ekstrem merupakan salah satu penyebab penting kegagalan program pengelolaan sumber daya air karena dapat melampaui asumsi dasar perencanaan, kapasitas infrastruktur, dan skenario operasi yang telah ditetapkan. Variabilitas iklim yang semakin tinggi, ditandai oleh hujan sangat lebat, banjir besar, kekeringan panjang, dan anomali musim membuat sistem SDA yang tidak dirancang adaptif menjadi rentan gagal fungsi. Pada saat Pembangunan infrastruktur cuaca ektrim mempengaruhi kondisi lapangan, stabilitas struktur, mutu pekerjaan, serta ketepatan metode konstruksi sehingga hasil akhir tidak memenuhi standar teknis yang direncanakan.Curah hujan ekstrem selama masa konstruksi sering menimbulkan banjir di area kerja, meningkatkan kadar air tanah, dan memicu longsoran lereng galian maupun timbunan yang berdampak mutu material dan proses konstruksi

5. Masalah Administrasi dan Hukum.

   Konstruksi bukan hanya soal semen dan bata, tapi juga soal kertas (dokumen), baik dari Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, bahkan sampai tahapan Pasca Konstruksi. Dimana semua tahapan tersebut harus menyesuaikan antara kebutuhan real dilapangan dengan mekanisme yang wajib diikuti sesuai peraturan yang berlaku.

6. Prioritas kegiatan Dinas PUPRP yang berubah seiring dengan Kebutuhan Daerah dan Program dari Pemerintah Pusat.

   Beberapa kegiatan Dinas PUPRP tidak terlaksana dengan baik bahkan gagal dilaksanakan karena adanya prioritas program/kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga mengharuskan terjadinya refocusing

7. Faktor Eksternal yang Tidak Terduga. Kenaikan Harga Material: Harga semen atau besi tiba-tiba naik drastis (inflasi). Hal ini sering membuat kontraktor "menjerit" dan akhirnya mengurangi kualitas atau malah kabur meninggalkan proyek (mangkrak). Cuaca Ekstrim: Hujan terus-menerus yang tidak diperhitungkan dalam jadwal bisa merusak struktur beton yang baru dicor.

8. Keterbatasan Anggaran

   Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan belum seluruh kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi secara optimal.

9. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal

   Sinkronisasi program antar OPD dan pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan efektif.

10. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

    Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur, seperti drainase dan fasilitas sanitasi, berdampak pada menurunnya fungsi dan umur layanan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Mengatasi Keterbatasan Anggaran

   Beberapa Upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, adalah:

   - Melalui penyusunan skala prioritas kegiatan berdasarkan tingkat kerusakan dan manfaat pelayanan.
   - Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi pelaksanaan kegiatan.

- Mengusulkan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran atau sumber pendanaan lain.
- Memperkuat perencanaan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan berat.

2. Mengantisipasi Dampak Cuaca Ekstrem

   Alternatif solusi mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan dengan perkiraan musim/cuaca, dan mempercepat pekerjaan pada musim cuaca baik.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia pada Bidang Bina Marga dapat dilakukan dengan, sebagai berikut:

   - Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala.
   - Penempatan personel sesuai kompetensi.
   - Optimalisasi pembagian tugas dan tanggung jawab.
   - Penguatan kerja sama tim dan pengawasan internal.

4. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian

   Penguatan pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih intensif dan sistematis guna memastikan pekerjaan sesuai rencana, spesifikasi teknis, jadwal, serta anggaran, serta segera melakukan tindak lanjut cepat atas temuan dan permasalahan.

5. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi

   Penguatan kerja sama antar pihak untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan menghindari tumpang tindih kegiatan, dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

   - Melakukan rapat koordinasi rutin dengan OPD dan pihak terkait.
   - Sinkronisasi jadwal kegiatan lintas sektor.
   - Meningkatkan komunikasi dengan penyedia jasa dan masyarakat.
   - menyelesakan permasalahan secara terpadu.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

   Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi untuk memperkuat kemampuan staf Bidang SDA dalam mendukung kinerja.

7. Mengatasi Keterbatasan Anggaran

   Beberapa Upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, adalah:

   - Melalui penyusunan skala prioritas kegiatan berdasarkan tingkat resiko dan manfaat
   - Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi pelaksanaan kegiatan.
   - Mengusulkan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran atau sumber pendanaan lain.
   - Optimalisasi Anggaran Operasi & Pemeliharaan (OP)
   - Perkuat Partisipasi Pengguna & Kelembagaan Lokal

     contohnya meliibatkan P3A dan kelompok tani dalam pemeliharaan ringan jaringan irigasi, menerapkan padat karya selektif untuk pekerjaan sederhana serta mengadakan kegiatan swakelola terkontrol untuk kegiatan rutin. hal lain adalah terus mengedukasi pengguna agar ikut menjaga aset, meningkatkan rasa memiliki yang menurunkan jumlah kerusakan.

8. Mengantisipasi Dampak Cuaca Ekstrem

   Alternatif solusi mengantisipasi dampak cuaca ekstreme, yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan dengan perkiraan musim/cuaca, mempercepat pekerjaan pada musim cuaca baik.

9. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia pada Bidang SDA dapat dilakukan dengan, sebagai berikut:

   - Melakukan Pemetaan Kompetensi & Kebutuhan SDM
   - Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berjenjang dan berkala.
   - Penempatan personel sesuai kompetensi.
   - Optimalisasi pembagian tugas dan tanggung jawab.
   - Penguatan kerja sama tim dan pengawasan internal.
   - Penguatan Kompetensi Operasional Lapangan

10. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian

    Penguatan pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih intensif dan sistematis guna memastikan pekerjaan sesuai rencana,

spesifikasi teknis, jadwal, serta anggaran, serta segera melakukan tindak lanjut cepat atas temuan dan permasalahan.

11. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi

    Penguatan kerja sama antar pihak untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan menghindari tumpang tindih kegiatan, dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

    - Melakukan Rapat koordinasi rutin dengan OPD dan pihak terkait.
    - Sinkronisasi jadwal kegiatan lintas sektor.
    - Meningkatkan komunikasi dengan penyedia jasa dan masyarakat.
    - menyelesakan permasalahan secara terpadu.
    - mulai mengembangkan basis data SDA terintegrasi intas instansi.

12. Strategi Penguatan Administrasi dan Mitigasi Hukum.

    Untuk mengatasi hambatan administrasi dan risiko pekerjaan, diperlukan transformasi dari sekadar "kepatuhan dokumen" menjadi "manajemen risiko" yang benar-benar diterapkan.

13. Manajemen Fleksibilitas Program (Solusi Refocusing).

    Agar proyek tidak terbengkalai saat terjadi perubahan prioritas anggaran, diperlukan sistem klasifikasi proyek berupa Kategorisasi Proyek Strategis, Perencanaan Multi-Years dan Sinkronisasi Database Pusat-Daerah.

14. Mitigasi Risiko Eksternal (Harga & Cuaca)

    Menghadapi inflasi dan cuaca ekstrem memerlukan klausul kontrak yang lebih adaptif dan penggunaan teknologi.

15. Optimalisasi Perencanaan dan Prioritas Program

    Melakukan pemutakhiran data infrastruktur secara berkala serta menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat.

16. Peningkatan efisiensi dan inovasi pembiayaan

    Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, termasuk sinergi pendanaan dari provinsi, pusat, dan sumber lainnya.

17. Penguatan koordinasi lintas sektor

Meningkatkan kolaborasi antar OPD, pemerintah desa, dan stakeholder terkait sejak tahap perencanaan.

18. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

    Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur melalui edukasi dan pemberdayaan agar keberlanjutan hasil pembangunan dapat terjaga.

19. Optimalisasi Pemeliharaan Infrastruktur

    Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala guna memperpanjang umur layanan infrastruktur yang telah dibangun.

Tabel 3.1.7
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Indeks Infrastruktur ke-PUan

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	209.655.870.218,7	203.332.336.962
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.319.031.261,96	28.266.006.856
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.572.645.028,58	23.195.615.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.957.249.024,96	99.281.955.286
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118.000.000	110.984.930
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.886.420.934,71	83.682.620.327
JUMLAH			**450.489.216.468,91**	**437.869.519.361**

$$\text{Efisiensi} = \frac{(450.489.216.468.91 \times 66.6) - 437.869.519.361}{(450.489.216.468.91 \times 66.6)} \times 100$$

Efisiensi = 98.54%

Tabel 3.1.8
Efisiensi Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
89,90 %	97,23 %	– 45,83 %

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	%	97%	94,79%	99,91%	90%	98,05%	108,95%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									108,95%

Tabel 3.1.10
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	%	90%	98,06%	108,95%	96	102,14%

a. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW

Definisi operasional dari persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pemanfaatan ruang yang direncanakan telah selaras dengan rencana tata ruang wlayah (pola dan struktur ruang) yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk dapat meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten. Saat ini masih terdapat 1,94% pemanfatan tata ruang yang dimohonkan oleh pelaku usaha/masyarakat melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR dikarenakan lokasi yang di mohonkan terletak pada zonasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut dan Perbub Rencana Detail tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikasi pola ruang diatas, yang tidak sesuai dengan peruntukannya terindikasi seluas 1,94% dari luas permohonan pemanfaatan ruang yang di mohonkan atau seluas ± 301,57 Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang yang telah berkesesuaian dengan Perda RTRW mencapai ± 98,06 % atau seluas ±15.262,09 Ha.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Luas RTRW} = \frac{\text{Luas Pemanfaatan ruang yg sesuai dengan RTRW}}{\text{Luas permohonan pemanfaan ruang}} \times 100\%$$

Tabel 3.1.11
Permohonan Pertimbangan Teknis Kawasan Tata Ruang

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan	Kawasan Peruntukan	Luas	Tanggal Pertimbangan Teknis	Nomor	Keterangan	
								Sesuai/bersyarat (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Terminal Pelaihari Tipe C	Zona Transportasi	± 9,3 Ha	04 Januari 2023	591.1/027-TR/DPUPRP	9,3	
2	PT. Laterite Karunia abadi	Desa Nusa indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	IUP Galian C Tanah Laterit	Zona Perkebunan	± 14,6 Ha	06 Januari 2023	050.13/0092-TR/DPUPRP	14,6	
3	PT. Ariqa Mega Tama	Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pembangunan Toko dan Perumahan Subsidi	Sub Zona Perdangan dan Jasa Skala SWP dan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	± 4,4 Ha	16 Januari 2023	591.1/066-TR/DPUPRP	4,4	
4	PT. Mekar Rezeki Jaya	Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	Pabrik Air Minum Dalam Kemasan	Sub Zona Perkebunan	± 2,5 Ha	20 Januari 2023	591.1/080-TR/DPUPRP	2,5	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	Sertifikasi Tanah	Jaringan jalan kabupaten (Jalan Lokal)	± 973.455 M^2	20 Januari 2023	591.1/082-TR/DPUPRP	97,35	

Grafik 3.1.2
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Tahun 2021 – 2025

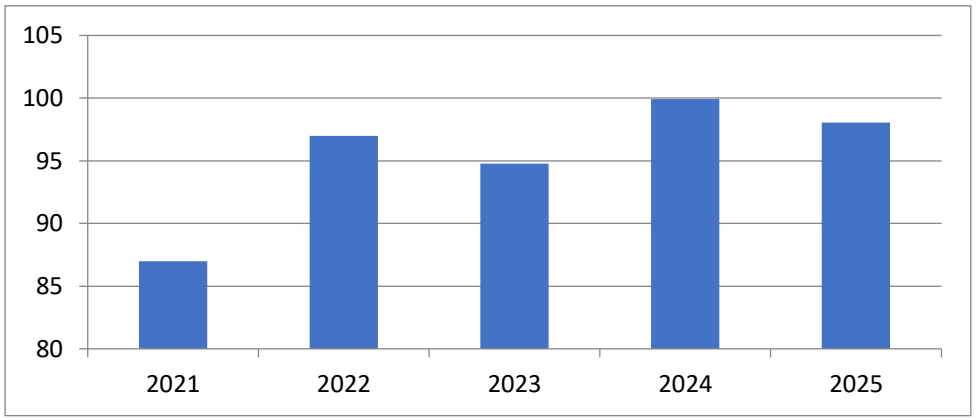

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024- 2043 pada danggal 6 Februari Tahun 2024 sebagai pengganti dari Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Tanah Laut Tahun 2016-2036 yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sampai dengan tahun 2024 juga telah ditetapkan sebanyak 9 Peraturan Bupati tentang RDTR yaitu:

1) Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042.
2) Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042.
3) Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022.
4) Peraturan Bupat Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jorong.
5) Peraturan Bupat Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Detail di Sekitar awasan Industri Jorong.
6) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Tambang Ulang.

7) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Panyipatan.
8) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kurau.
9) Peraturan Bupati Nomor 3Tahun 2025 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bumi makmur.

Gambar 3.29
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2024

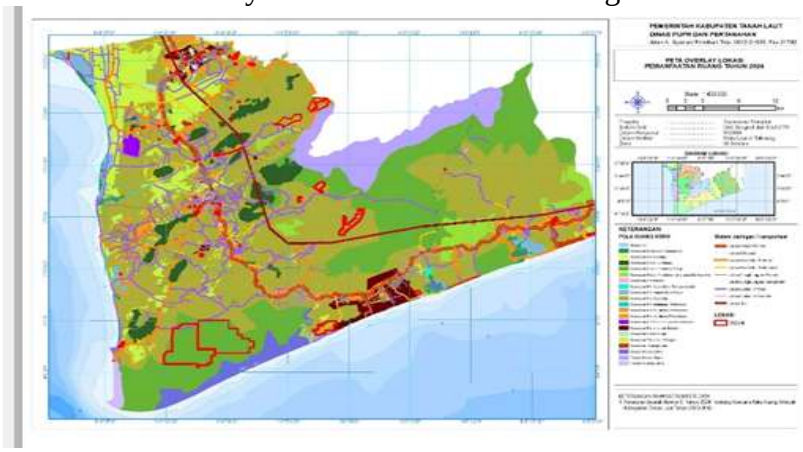

Gambar 3.30
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2025

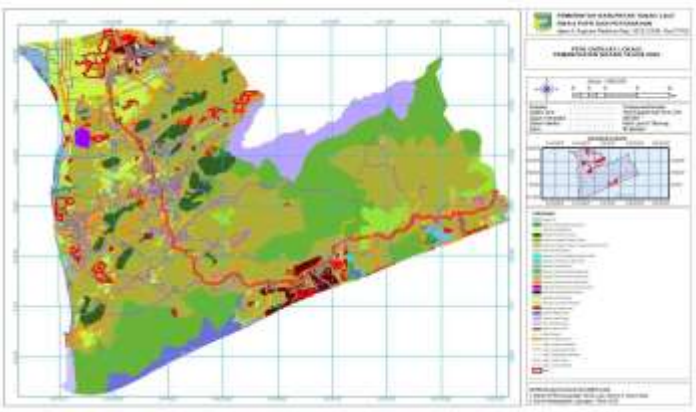

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator " Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW" Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Pertanahan tahun 2025 tercatat sebesar 98,06% atau setara dengan 108.96% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 99,91%, dengan tingkat pencapaian 116,89% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 87% dan terus meningkat menjadi 97% pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 94,79% dan pada tahun 2024 sebesar 99,91%. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohokan berkesesuaian dengan Perda RTRW Noor 5 Tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator " Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW" Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2025 tercatat mencapai 98,06% yang setara dengan 108,96% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 93%, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 98,06% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 2,76% per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan "Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang", Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan:

a. Peningkatan ketersediaan rencana umum tata ruang wilayah yang tepat

1. Evaluasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
2. Legalisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Berapa kecamatan yg sudah punya dokumen RDTR sebelum tahun 2025 yaitu Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong,

Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Tambang Ulang, dan di tahun 2025 yaitu kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur serta di tahun 2026 meliputi Kecamatan Kintap, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bajuin,

Gambar 3.30

Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk Kegiatan Proses Legalisasi RDTR WP Bajuin dengan Kementerian ATR/BPN (1/2)

Gambar 3.31

Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk Kegiatan Proses Legalisasi RDTR WP Bajuin dengan Kementerian ATR/BPN (2/2)

Gambar 3.32
Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk Kegiatan Proses Legalisasi RDTR WP Batu Ampar dan RDTR WP Kintap dengan Kementerian ATR/BPN (1/2)

Gambar 3.33
Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk Kegiatan Proses Legalisasi RDTR WP Batu Ampar dan RDTR WP Kintap dengan Kementerian ATR/BPN (2/2)

Gambar 3.34
Rapat Koordinasi Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN terkait Evaluasi RDTR WP Pelaihari, RDTR WP Bati Bati dan RDTR WP Takisung

b. Penerbitan pertimbangan teknis/rekomtek pemanfaatan ruang

Dalam upaya layanan kesesuaian kegiatan pemanfatatan ruang yang di mohonkan baik yang bersifat berusaha dan non berusaha melalui Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah laut. Sebelum tahun 2025 terdapat 116 (2024) dokumen pertek, 117 (2023) dokumen pertek, 101 (2022) dokumen pertek, 94 (2021) dokumen pertek dan pada tahun 2025 terdapat 80 dokumen pertimbangan teknis yang di keluarkan guna pemanfaatan ruang yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang

Saat ini terkait kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada, masih belum terdapat rincian dimaksud. Bidang tata ruang saat ini hanya melakukan pendampingan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang di laksanakan oleh Kementeria ATR/BPN sesuai dengan kewenangannya.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Target pembahasan dan penyelesaian raperbub RDTR yang sudah terencana dalam renstra Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut.
   Perencanaan yang matang melalui program pembentukan peraturan bupati memberikan arah yang jelas terhadap target pembahasan dan penyelesaian rancangan perturan bupati terkait RDTR. Dimana penyelesaian raperbub dimaksud di rencanakan di selesaikan dalam 3 tahun anggaran yang meliputi penyusunan peta dasar, materi teknis dan legalisasi.
2. Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam membahas dan menyelesaikan raperbub sesuai renstra yang di susun.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan komitmen tinggi dengan membahas raperbub RDTR di setiap kecamatan yang telah di tetapkan.
4. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kepada Masyarakat.
   Kolaborasi yang baik dengan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut guna mendukung kelancaran pemberian pertimbangan teknis tata ruang/rekomtek terhadap rencana

kegiatan yang di mohonkan baik yang sifatnya berusaha maupun non berusaha sesuai prosedur yang berlaku.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Pengaruh faktor eksternal pada tahapan pembahasan raperbub RDTR. Proses pembahasan raperbub terkadang terhambat karena perlunya konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi dari Gubernur serta kementerian ATR/BPN guna mendapatkan persetujuan substansi terhadap rancangan perbub RDTR yang telah di susun sebagai bagian dari mekanisme yang harus ditempuh.
2. Kelengkapan Data Permohonan Pertimbangan Teknis/Rekomtek yang di Sampaikan oleh Pemohon melalui DPMPTSP Kurang Lengkap Sesuai Persyaratan Teknis.
3. Terhadap permohonan pertimbangan teknis/rekomtek yang di mohonkan oleh pemohon melalui DPMPTSP seringkali terdapat kekurangan data dan informasi yang di sampaikan sehingga dapat menghambat proses analisis terhadap rencana kegiatan yang di mohonkan sesuai denga rencana umum tata ruang baik perda RTRW maupun Perbub RDTR yang telah ditetapkan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi untuk memperkuat kemampuan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang tata Ruang dalam mendukung kinerja dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
2. Sosialisasi Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Perda RTRW maupun Perbub RDTR yang telah di hasilkan kepada masyarakat.
3. Jadwal kegiatan sosialisasi dokumen Rencana Umum tata Ruang yang sudah di terbitkan hendaknya dapat di sebarluaskan kepada masyarakat umum sebagai dasar penggunaan lahan untuk berkegiatan baik yang sifatnya berusaha maupun non berusaha yang sampikan secara langsung maupun tidak langsung melalui aplikasi**.**

Tabel 3.1.12
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Tata Ruang

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.990.013,14	2.862.906.532
JUMLAH			**2.902.990.013,14**	**2.862.906.532**

$$\text{Efisiensi} = \frac{(2{,}902{,}990{,}013.14 \times 108.95) - 2{,}862{,}906{,}532}{(2{,}902{,}990{,}013.14 \times 108.95)} \times 100$$

Efisiensi = 99,09%

Tabel 3.1.13
Efisiensi Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	98,62	8,21%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah

Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.14
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik	%	100%	100%	50%	51%	96%	180%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									180 %

Tabel 3.1.15
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik	%	51%	96%	180%	100%	100%

a. Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik

Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Termanfaatkan dengan Baik adalah persentase jumlah tanah aset milik Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemanfaatan lainnya yang sah, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tanah aset Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Termanfaatkan dengan Baik dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik} = \frac{\text{Jumlah asset tanah pemda yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah asset tanah pemda}} \times 100\%$$

Kab Tanah Laut

Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik =	2469 / 2569	x 100% = 96 %

Inventarisasi data pemanfaatan aset tanah pemda di Kab. Tanah Laut Tahun 2025

Kec. Kintap

Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik =	166 / 181	x 100% = 91 %

Inventarisasi data pemanfaatan aset tanah pemda di Kec.Kintap Tahun 2025

Grafik 3.1.3

Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik Tahun 2021 – 2025

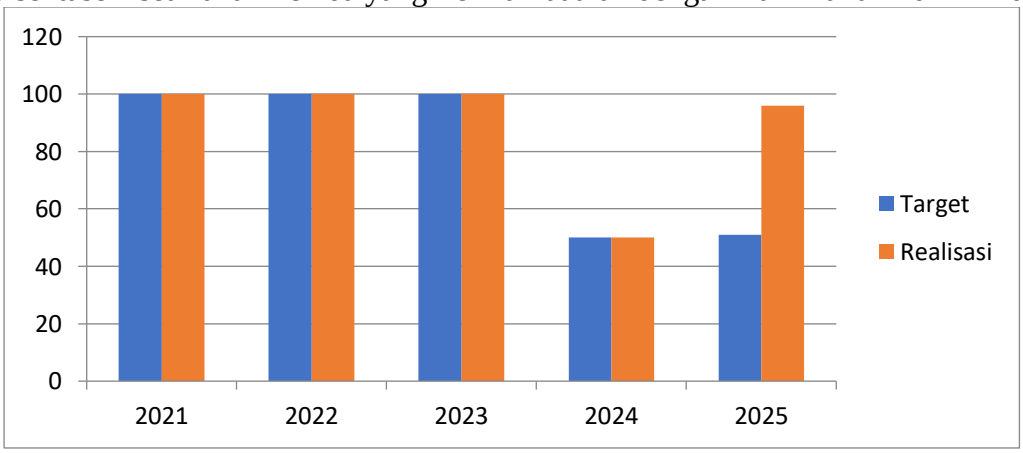

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator " Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik, Inventarisasi pemanfaatan tanah asset pemda Kabupaten Tanah

Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 96 %, atau capaian setara dengan 180 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 51%. capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja indikator Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) tahun 2025 realisasinya adalah hampir sama dengan tahun 2024, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 92% dengan capaian 180%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) adalah tetap

1) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator " Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik, Inventarisasi pemanfaatan tanah asset pemda Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 96 %, atau capaian setara dengan 180 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 51%. capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja indikator Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) tahun 2025 realisasinya adalah hampir sama dengan tahun 2024, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 92% dengan capaian 180%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) adalah tetap.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan "Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah", Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan.

a. Peningkatan Ketertiban Tanah Pemda

1. Inventarisasi asset tanah pemda.

Inventarisasi aset tanah Pemda merupakan kegiatan yang sangat mendukung pemerintah daerah karena memastikan data aset yang akurat, tertib, dan legal. Dengan inventarisasi yang baik, Pemda dapat melindungi aset dari sengketa, mencegah penguasaan ilegal, serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut yang laksanakan fokus pada tahun 2025 di Kecamatan Kintap

Gambar 3.35
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Pandan Sari

Gambar 3.36
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Pandan Sari

Gambar 3.37
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kintapura (1/2)

Gambar 3.38
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kintapura (2/2)

Gambar 3.39
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kinta (1/2)

Gambar 3.40
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kintap (2/2)

Gambar 3.41
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kebun Raya (1/2)

Gambar 3.42
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kebun Raya (2/2)

Gambar 3.43
Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kintp Kecil (1/2)

Gambar 3.44

Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Kintp Kecil (2/2)

Gambar 3.45

Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Pasir Putih (1/2)

Gambar 3.46

Inventarisasi aset tanah Pemda pada Kabupaten Tanah Laut – Desa Pasir Putih (2/2)

b. Penyelesaian konflik pertanahan

1. Inventarisasi kasus pertanahan

Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di kabupaten adalah kegiatan pendataan dan pemetaan seluruh permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah kabupaten, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih lahan, konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan, serta masalah batas tanah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah, jenis, lokasi, dan status penanganan konflik pertanahan sehingga pemerintah kabupaten dapat menyusun kebijakan, menentukan prioritas penyelesaian, serta mencegah konflik serupa di masa depan.

Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di kabuapaten Tanah Laut yang laksanakan fokus pada tahun 2025 di tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Bumi Makmur, dan Kecamatan Kurau.

Gambar 3.46
Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di Kab. Tala Laut Kec. Bati-bati (1/2)

Gambar 3.47
Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di Kab. Tala - Kec. Bati-bati (2/2)

.

Gambar 3.48
Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di Kab. Tala - Kec. Bumi Makmur (1/2)

Gambar 3.50
Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di Kab. Tala - Kec. Bumi Makmur (2/2)

Gambar 3.51
Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di Kab. Tala - Kec. Bumi Kurau (1/2)

Gambar 3.52
Inventarisasi kasus/konflik pertanahan di Kab. Tala - Kec. Bumi Kurau (2/2)

2. Mediasi penyelesaian kasus pertanahan

Kegiatan mediasi kasus/konflik pertanahan di kabupaten adalah proses penyelesaian sengketa pertanahan yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten sebagai pihak netral, dengan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama.

Mediasi ini bertujuan mencari solusi damai tanpa melalui proses pengadilan, sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan lebih cepat, adil, dan mengurangi dampak sosial di masyarakat, serta menjaga ketertiban dan stabilitas di wilayah kabupaten.

Mediasi kasus/konflik pertanahan di kabuapaten Tanah Laut yang laksanakan fokus pada tahun 2025, yaitu

1. Perselisihan Riwayat kepemilikan lahan, lokasi Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari

2. Terkait klaim lahan sodara sahrun, dk katas lahan PT.INDORAYA EVERLATEX (PT.CPKA), lokasi Kintapura Kecamatan Kintap

Gambar 3.53
Mediasi penyelesaian kasus pertanahan (1/3)

Gambar 3.54
Mediasi penyelesaian kasus pertanahan (1/3)

Gambar 3.55
Mediasi penyelesaian kasus pertanahan (1/3)

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Maka akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan terus berkoordinasi terhadap pemerintah Desa sehingga target tercapai dan masyarakat terlayani dalam bentuk pemberian informasi yang secara langsung.

2. Maka akan mengoptimalkan dari kegiatan Kijang Mas Tala dengan terus berkolaborasi Bersama Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Pertanahan ATR/BPN sehingga masyarakat yang mendaftarkan dalam proses balik nama sertipikat terlayani dengan baik dan sampai selesai

3. Maka akan mengoptimalkan kegiatan Survei dan Peninjauan Lokasi pada tahun 2025

4. Maka akan menambah atau meningkatkan Kualitas Dokumentasi dan Pendataan

5. Maka akan mengatur pelaksanaan kegiatan sosialisasi seoptimal mungkin sehingga di tahun 2025 dapat terselesaikan

6. mengoptimalkan Koordinasi dengan Aparat Desa sehingga jadwal bisa dapat yang sesuai.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Jadwal pelaksanaan Sosialisasi yang kadang berbenturan antara Jadwal Narasumber dengan jadwal di Kantor Desa salah satu kebetulan ada yang tidak bisa.
2. Untuk pelaksanaan fasilitasi Mediasi konflik/kasus ini tidak bisa di prediksi, karena menyesuaikan bila ada permohonan surat yang masuk .
3. Untuk pelaksanaan sidang ditempat program Kijang Mas Tala / di Desa secara langsung tetap memastikan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri agar tidak berbenturan.
4. Pelaksanaan Inventarisasi Konflik/kasus ini tertunda karena adanya Mutasi Kepala Bidang maka harus menunggu pejabat pengganti dulu sebagai KPA .
5. Kondisi Fisik Aset yang Sulit Diakses Beberapa aset seperti tanah kosong, atau infrastruktur di lokasi terpencil sulit dijangkau untuk dilakukan pengecekan dan penilaian kondisi fisik.
6. Kondisi cuaca buruk atau medan geografis yang sulit dapat menghambat proses survey lapangan, terutama untuk pengecekan/pemeriksaan setempat pada program Kijang Mas Tala.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. **Pentingnya Sosialisasi kepada masyarakat solusi untuk Mengurangi Konflik Pertanahan**

   Sosialisasi rencana aksi merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya mengurangi konflik pertanahan di masyarakat. Hal ini karena konflik tanah umumnya

tidak hanya terjadi akibat sengketa batas atau kepemilikan, tetapi juga dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, prosedur, dan bukti hukum pertanahan.

Melalui sosialisasi, pemerintah desa/kelurahan maupun instansi terkait dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai hak dan kewajiban masyarakat, tata cara pengurusan dokumen tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang benar. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maupun praktik percaloan yang sering menjadi penyebab munculnya masalah pertanahan.

Selain itu, sosialisasi juga berfungsi untuk membangun kesadaran kolektif bahwa masalah tanah sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan jalur hukum yang tepat, bukan dengan cara konflik terbuka yang dapat merugikan semua pihak. Sosialisasi yang baik akan mendorong masyarakat lebih tertib administrasi, misalnya dengan memasang patok batas tanah, melengkapi dokumen kepemilikan, dan melakukan transaksi jual beli tanah sesuai prosedur.

Dengan adanya sosialisasi rencana aksi secara berkelanjutan, masyarakat menjadi lebih paham, lebih siap mencegah potensi sengketa sejak awal, serta lebih percaya kepada mekanisme penyelesaian yang disediakan pemerintah. Pada akhirnya, sosialisasi menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif dalam urusan pertanahan.

2. **Pentingnya juga adanya Sosialisasi pada siswa SMA solusi untuk Mengurangi Konflik Pertanahan**

Sosialisasi solusi untuk mengurangi konflik pertanahan sangat penting, termasuk untuk siswa SMA, karena masalah tanah bukan hanya urusan orang tua atau pemerintah. Konflik pertanahan bisa terjadi di lingkungan sekitar kita dan dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk generasi muda.

Banyak konflik tanah muncul bukan karena orang ingin bermusuhan, tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Contohnya seperti batas tanah yang tidak jelas, surat tanah yang tidak lengkap, jual beli tanah tanpa prosedur yang benar, atau pembagian warisan yang tidak disepakati. Jika hal-hal ini tidak dipahami sejak awal, masalah kecil bisa berkembang menjadi sengketa besar dan memicu pertengkaran antar tetangga, bahkan antar keluarga.

Melalui sosialisasi, siswa SMA dapat mengetahui solusi yang tepat untuk mencegah konflik pertanahan, seperti pentingnya memasang patok batas, melengkapi dokumen kepemilikan, melakukan transaksi tanah secara legal, serta menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan jalur yang benar. Sosialisasi juga membantu siswa memahami bahwa konflik tanah bisa dicegah dengan sikap tertib administrasi dan tidak

3. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia.**

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi untuk memperkuat kemampuan staf Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang dan Pertanahan khususnya pada Bidang Pertanahan agar mendukung kinerja .

Tabel 3.1.16
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.034.090.419,09	929.960.328
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*53.235.423*	*32.228.800*
JUMLAH			**1.087.325.842.09**	**962.189.128**

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1087325842.09 \times 100) - 962189128}{(1087325842.09 \times 100)} \times 100$$

Efisiensi = 99.12%

Tabel 3.1.17
Efisiensi Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Daerah

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	88,49 %	44,44%

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, dan Meningkatnya pemanfaatan

tanah daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 166 ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan serta di dukung oleh 9 Program dengan Pagu Rp. 454.499.532.324,14 dan terealisasi Rp. 441.694.615.021 atau sebesar 97,18%.

Tabel 3.1.18
Realisasi Program Penunjang

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	209.655.870.218,7	203.332.336.962
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.319.031.261,96	28.266.006.856
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.572.645.028,58	23.195.615.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.957.249.024,96	99.281.955.286
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118.000.000	110.984.930
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.886.420.934,71	83.682.620.327
JUMLAH			**450.489.216.468,91**	**437.869.519.361**
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.990.013,14	2.862.906.532
JUMLAH			**2.902.990.013,14**	**2.862.906.532**
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.034.090.419,09	929.960.328
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*53.235.423*	*32.228.800*
JUMLAH			**1.087.325.842.09**	**962.189.128**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	:	Efisiensi
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i
CKi	:	Capaian keluaran i

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 475.904.686.915,69 dengan realisasi sebesar Rp. 461.440.924.899,00 atau 99,94 %, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 161.787.140.287,85 dengan realisasi sebesar Rp. 154.973.097.511,00 atau 95.79 % dengan rincian:

   1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 10.526.548.388,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.448.170.642,- atau 92,12 %.
   2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp. 119.147.855.445,50 dengan realisasi sebesar Rp. 113.961.208.969,- atau 95,65 %
   3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp. 32.382.736.454,35,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.563.717.900,- atau 97,47 %.

2. Belanja Modal

   Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp. 314.117.546.627,84,-

Realisasi belanja modal sebesar Rp. 306.467.827.388,- atau 97,56 %. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah dengan pagu anggaran Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp. 107.122.770,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.644.500,- atau 98,62 %.
3. Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.433.035.136,83,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.536.869.500,- atau 97,73 %.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 230.577.388.721,01 dengan realisasi sebesar Rp. 224.825.286.388,- atau 97,51 %
5. Belanja Modal Aset Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

TUJUAN I

Tabel 3..1.19

Meningkatnya pemerataan infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ke Pu-an yang Berkualitas	1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Nilai)	74,77	46,49	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	209.655.870.218,7	203.332.336.962	96,98
						2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.319.031.261,96	28.266.006.856	96,40
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.572.645.028,58	23.195.615.000	98,40
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.957.249.024,96	99.281.955.286	97,37
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	118.000.000	110.984.930	94,05

							KONSTRUKSI			
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.886.420.934,71	83.682.620.327	97,43
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)	90			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.990.013,14	2.862.906.532	98,61
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	3	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik (%)	51			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.034.090.419,09	929.960.328	95,73
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*53.235.423*	***32.228.800***	60,54

Tabel 3.1.20

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**112,15**	**685.205.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**112,15**	**685.205.000,00**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**112,15**	**685.205.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**112,15**	**685.205.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**112,15**	**685.205.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**475.904.686.915,69**	**461.406.349.899,00**	**96,95**	**564.361.844.762,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**161.787.140.287,85**	**154.973.097.511,00**	**95,79**	**201.142.788.090,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	10.256.548.388,00	9.448.170.642,00	92,12	9.472.226.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.147.855.445,50	113.961.208.969,00	95,65	178.367.054.490,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.382.736.454,35	31.563.717.900,00	97,47	13.303.507.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**161.787.140.287,85**	**154.973.097.511,00**	**95,79**	**201.142.788.090,00**

5.2	**BELANJA MODAL**	**314.117.546.627,84**	**306.433.252.388,00**	**97,55**	**363.219.056.672,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	3.139.900.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.122.770,00	105.644.500,00	98,62	5.263.486.329,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.433.035.136,83	81.517.546.500,00	97,70	126.866.182.867,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.577.388.721,01	224.810.061.388,00	97,50	227.886.986.976,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**314.117.546.627,84**	**306.433.252.388,00**	**97,55**	**363.219.056.672,00**
	JUMLAH BELANJA	**475.904.686.915,69**	**461.406.349.899,00**	**96,95**	**564.361.844.762,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(475.354.686.915,69)**	**(460.789.514.899,00)**	**96,94**	**(563.676.639.762,00)**

Tabel 3.1.21
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**685.205.000,00**	**-9,98**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**685.205.000,00**	**-9,98**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**685.205.000,00**	**-9,98**
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**685.205.000,00**	**-9,98**
	JUMLAH PENDAPATAN	**550.000.000,00**	**616.835.000,00**	**685.205.000,00**	**-9,98**
5	**BELANJA DAERAH**	**475.904.686.915,69**	**461.406.349.899,00**	**564.361.844.762,00**	**-18,24**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**161.787.140.287,85**	**154.973.097.511,00**	**201.142.788.090,00**	**-22,95**
5.1.01	Belanja Pegawai	10.256.548.388,00	9.448.170.642,00	9.472.226.600,00	**-0,25**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.147.855.445,50	113.961.208.969,00	178.367.054.490,00	**-36,11**

5.1.05	Belanja Hibah	32.382.736.454,35	31.563.717.900,00	13.303.507.000,00	**137,26**
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**161.787.140.287,85**	**154.973.097.511,00**	**201.142.788.090,00**	**-22,95**
5.2	**BELANJA MODAL**	**314.117.546.627,84**	**306.433.252.388,00**	**363.219.056.672,00**	**-15,63**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	3.139.900.500,00	**-100,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.122.770,00	105.644.500,00	5.263.486.329,00	**-97,99**
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.433.035.136,83	81.517.546.500,00	126.866.182.867,00	**-35,75**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**230.577.388.721,01**	**224.810.061.388,00**	**227.886.986.976,00**	**-1,35**
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	62.500.000,00	**-100,00**
	JUMLAH BELANJA MODAL	**314.117.546.627,84**	**306.433.252.388,00**	**363.219.056.672,00**	**-15,63**
	JUMLAH BELANJA	**475.904.686.915,69**	**461.406.349.899,00**	**564.361.844.762,00**	**-18,24**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **3 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 117,01% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis (RPJMD) 2025-2029 yang terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja.

2. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.

3. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang

4. Mengingkatkan fungsi pengawasan keahlian profesional, baik mengikuti diklat, bimtek, kaji tiru termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk

5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;

6. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan kinerja organisasi.

Pelaihari, 10 April 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, MM
NIP. 19750412 199603 1 002

LAMPIRAN

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
DPUPRP TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Sekretaris					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82,5	83	100,12%
Kasubbag Umpeg					
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	100%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
14	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	100%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	100%
Kasubbag Perencanaan					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%
Kasubbag Keuangan					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	65 Orang/Bulan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumkah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Kabid SDA					
1	meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Luasan Lahan yang teraliri Irigasi dengan baik	13.065 Hektar	13.065 Hektar	100%
2	meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Persentase DAS dalam Kondisi Baik	19%	19%	100%
		Persentase Panjang Pantai yang Terlindungi	54%	54%	100%
Kabid CKJK					
1	Meningkatnya kualitas layanan SPAM Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan dengan Baik	69.933 RT	71971 RT	102%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah	Persentase Limbah yang Terkelola dengan Baik	72.62%	79,02 %	108%
3	optimalisasi pembangunan drainase dalam jalan kabupaten	Persentase Drainase Jalan dalam Kondisi Baik	19%	15%	78,94%
4	Meningkatnya kualitas konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase Konstruksi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik	80%	80%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tertib	20%	20%	100%
Kabid BM					
1	Meningkatnya Sarana Penunjang Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	58%	57,18%	98,58%
2	Optimalisasi Jaringan Irigasi Sesuai Design	Persentase Capaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Kabid TR					
1	Meningkatnya Ketaatan pembangunan wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	95%	95%	100%
2	Meningkatnya ketersediaan tata ruang wilayah yang tepat	Persentase capaian penetapan rencana Tata Ruang Wilayah	100%	81%	81%
3	Meningkatnya ketersediaan tata ruang wilayah yang tepat	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten	100%	100%	100%
Kabid Pertanahan					
1	Tertanganinya Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Legalitas Tanah Pemda	Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Kepala UPTD					
1	Meningkatkan retribusi jasa sewa alat berat dan sewa alat pengujian material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	140.000.000	80.545.000	57,53%
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	410.000.000	536.290.000	130,80%
Kasubbag TU UPTD					
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah	71 Buah	100%
2	Melakukan pemeliharaan /rehabilitasis sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
3	Melakukan pelayanan administrasi UPTD Peralatan	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	200 Pelayanan	200 Pelayanan	100%
4	Melakukan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia UPTD Perlatan dan Pengujian Material Kontruksi	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	40 Orang	40 Orang	100%

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
	NIP 19750412 199603 1 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	TUJUAN		
1	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur	Indeks infrastruktur Daerah	54,21 Nilai
	SASARAN		
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Indekas Infrastruktur Pekerjaan Umum	74,77 Nilai
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	90 Persentase
3	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	51 Persentase

	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	85.886.420.934
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.319.031.262
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.041.000.000
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	23.572.645.029
5	Program Penataan Bangunan Gedung	101.957.249.025
6	Program Penyelenggaraan Jalan	209.655.870.218
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	118.000.000
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.902.990.013
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.034.090.419
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.364.154.591
11	Program Penatagunaan Tanah	53.235.423

Tanah Laut, 02 September 2025

BUPATI TANAH LAUT

H. RAHMAT TRIANTO

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	RIDHO RIFANI, ST
NIP 19750412 199603 1 002	NIP 198506012010011016

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.650.368.017

TANAH LAUT, 02 September 2025

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

SEKRETARIS

RIDHO RIFANI, ST
NIP 19850601 201001 1 016

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI HADI PUTRA, ST. MT

Jabatan : Kabid Bina Marga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT,

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	DWI HADI PUTRA, ST. MT
19750412 199603 1 002	NIP 19740517 200604 1 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sarana penunjang jalan (PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN)	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	58 Persen
2	Optimalisasi jaringan irigasi sesuai design (Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100 Persen

	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	209.655.870.218
	Program	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	209.655.870.218

TANAH LAUT,

KEPALA DINAS TANAH LAUT

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
19750412 199603 1 002

Kabid Bina Marga

DWI HADI PUTRA, ST. MT
NIP 19740517 200604 1 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kabid Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST
NIP 19750412 199603 1 002	NIP 19740313 199903 1 005

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik (PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA))	Luasan Lahan yang teraliri Irigasi dengan baik	13.065 Hektar
	meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Persentase DAS dalam Kondisi Baik	19 Persen
	-	Persentase Panjang Pantai yang Terlindungi	54 Persen
2	Optimalisasi normalisasi DAS sesuai standar (Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	0 352.77 Hektar
3	optimalisasi perlindungan pantai (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	88 DI/DIR

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.070.694.988
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.815.725.946
	Program	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.886.420.934

TANAH LAUT, 02 September 2025

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

Kabid Sumber Daya Air

ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST
NIP 19740313 199903 1 005

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT

Jabatan : Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT
NIP 19750412 199603 1 002	NIP 19861115 201001 1 006

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan SPAM Rumah Tangga (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan dengan Baik	69.933 RT
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH)	Persentase Limbah yang Terkelola dengan Baik	72.619 Peresen
3	optimalisasi pembangunan drainase dalam jalan kabupaten (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE)	Persentase Drainase Jalan dalam Kondisi Baik	18.546Persen
4	Meningkatnya kualitas konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah (PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG)	Persentase Konstruksi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik	80 Persen
5	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi (PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI)	Persentase Jasa Konstruksi yang Tertib	20 Persen
1	- (Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	82 persen
2	Terlaksananya Optimalisasi pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman (Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	82 persen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Daerah Kabupaten/Kota)		
3	optimalisasi pembangunan drainase dalam jalan kabupaten (Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota	0 8,132 persen
4	Optimalisasi pemeliharaan gedung pemerintah berkualitas (Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi)	Persentase capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 persen

	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	29.319.031.262
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.041.000.000
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.572.645.029
4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	118.000.000
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.319.031.262
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.041.000.000

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.572.645.029
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.957.249.025
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118.000.000

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

TANAH LAUT, 02 September 2025
Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT
NIP 19861115 201001 1 006

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST M.P

Jabatan : Kabid Tata Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P
NIP 19750412 199603 1 002	NIP 19791213 200604 1 011

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketaatan pembangunan wilayah (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	95 Persen
2	Meningkatnya ketersediaan tata ruang wilayah yang tepat (Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota)	Persentase capaian penetapan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tanah Laut	100 Persen
3	Meningkatnya ketersediaan tata ruang wilayah yang tepat (Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 persen
4	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang (Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten	100 Persen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.320.236.187
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	479.113.826
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	103.640.000
	Program	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.990.013

TANAH LAUT, 02 September 2025

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

KABID TATA RUANG

ULIL AMRI BAHTIAR, ST M.P
NIP 19791213 200604 1 011

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANA MARTIANA, ST

Jabatan : Plt. Kabid Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	NANA MARTIANA, ST
NIP 19750412 199603 1 002	NIP 19860318 200803 2 003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN)	Cakupan penyelesaian konflik tanah	80 Persen
2	- (PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH)	Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Tertib	80 Persen
1	Tertanganinya konflik pertanahan (Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen
2	Meningkatnya legalitas tanah pemda (Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100 Persen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.034.090.419
2	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	53.235.423
	Program	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.034.090.419
2	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	53.235.423

TANAH LAUT, 02 September 2025

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

PLT. KABID PERTANAHAN

NANA MARTIANA, ST
NIP 198603182008032003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMADHANY SURYANATA, ST , M.SI

Jabatan : Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.	RAMADHANY SURYANATA, ST , M.SI
NIP 19750412 199603 1 002	NIP 19751001 200903 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan retribusi jasa sewa alat berat dan sewa alat pengujian material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	140.000.000,00
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	410.000.000,00

	Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.985.439,20
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penungjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.181.305,00

TANAH LAUT, 02 September 2025

KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M.M.
NIP 19750412 199603 1 002

KEPALA UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

RAMADHANY SURYANATA, ST , M.SI
NIP 19751001 200903 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMELDA, S.Pd M.Pd

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si

Jabatan : Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si	IMELDA, S.Pd M.Pd
NIP 19751001 200903 1 004	NIP 19710815 199702 2 007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah
2	Melakukan pemeliharaan /rehabilitasis sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
3	Melakukan pelayanan administrasi UPTD Peralatan	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	200 Pelayanan
4	Melakukan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia UPTD Perlatan dan Pengujian Material Kontruksi	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	40 Orang

	Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.985.439,20
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penungjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.181.305,00
	Sub Kegiatan	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.574,00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.494.504,97
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.994.508,44
5	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	5.130.851,79
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.870.000,00
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.000.000,00
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	435.135.135,00
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.666.000,00

TANAH LAUT, 02 September 2025

KEPALA UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

RAMADHANY SURYANATA, ST , M.SI.
NIP 19751001 200903 1 004

KASUBBAG TATA USAHA UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONTRUKSI

IMELDA, S.Pd M.Pd
NIP 19710815 199702 2 007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ARIEF YASIR, S. KOM, M.M.

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIDHO RIFANI, ST	M. ARIEF YASIR, S. KOM, M.M.
NIP 198506012010011016	NIP 198305092006041004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
2	- (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	8 Dokumen
3	- (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.810.815
	Sub Kegiatan	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.561.645
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.249.170

TANAH LAUT, 02 September 2025

SEKRETARIS

RIDHO RIFANI, ST
NIP 19850601 201001 1 016

KASUBBAG. PERENCANAAN

M. ARIEF YASIR, S. KOM, M.M.
NIP 19830509 200604 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANA MARTIANA, ST

Jabatan : Kasubbag. Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIDHO RIFANI, ST	NANA MARTIANA, ST
NIP 19850601 201001 1 016	NIP 19860318 200803 2 003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
2	- (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan
3	- (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.314.047.712
	Sub Kegiatan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.256.548.388
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.499.324

TANAH LAUT, 02 September 2025

SEKRETARIS

RIDHO RIFANI, ST
NIP 19850601 201001 1 016

KASUBBAG. KEUANGAN

NANA MARTIANA, ST
NIP 19860318 200803 2 003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani No. 2a Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005
Website : https://puprp.tanahlautkab.go.id// e-mail : dpuprp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHDA FU'ADI, S.I.KOM, M.M.

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT,

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIDHO RIFANI, ST	AHDA FU'ADI, S.I.KOM, M.M.
NIP 19850601 201001 1 016	NIP 19821111 200604 1 007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen
2	- (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
3	- (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
4	- (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
5	- (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
6	- (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
7	- (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
8	- (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang
9	- (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
10	- (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
11	- (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
12	- (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
13	- (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
14	- (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
15	- (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

16	- (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit
17	- (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
18	- (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
19	- (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
20	- (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit
21	- (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.074.990
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.309.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.475.786.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.339.500
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.545.720
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.336.957
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.999.113
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.833.927
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
10	Penyediaan Bahan/Material	17.969.570
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.400.000
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.989.703
13	Pengadaan Mebel	24.309.000

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.000.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.065.786.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.490.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.812.000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.037.500

TANAH LAUT, 02 September 2025

SEKRETARIS

RIDHO RIFANI, ST
NIP 19850601 201001 1 016

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

AHDA FU'ADI, S.I.KOM, M.M.
NIP 19821111 200604 1 007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165
Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 048 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa dalam rangka Menyusun pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Bupati Tanah Laut tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Indikator Kinerja Utama ini mencadi acuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025 – 2029.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 29 Agustus 2025

A.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M. M
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19750412 199603 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 048 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 Agustus 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan ;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan ;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pembinaan UPT Dinas ;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	$\frac{Panjang\ jalan\ dalam\ kondisi\ mantap}{Total\ pjg\ jalan\ di\ Kab.Tanah\ Laut} x\ 30\% + \frac{Jumlah\ irigasi\ dalam\ kondisi\ baik}{Total\ panjang\ irigasi\ di\ Kab.Tanah\ Laut} x\ 30\% + \frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ meakses\ air\ bersih}{Jumlah\ rumah\ tangga\ di\ Kab.Tanah\ Laut} x\ 30\% + \frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ meakses\ sanitasi\ layak}{Jumlah\ rumah\ tangga\ di\ Kab.Tanah\ Laut} x\ 5\% + \frac{Jumlah\ panjang\ jalan\ yang\ ber\ drainase}{Total\ panjang\ jalan\ di\ Kab.Tanah\ Laut} x\ 5\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Dipindai dengan CamScanner

2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	Jumlah pertimbangan teknis yang dibuat / Jumlah pertimbangan teknis x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Daerah	Persentase Aset Tanah Pemda yang Termanfaatkan dengan Baik	Jumlah aset tanah pemda yang dimanfaatkan / Jumlah aset tanah pemda x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan/ BPKAD

Pelaihari, 29 Agustus 2025

A.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST, M. M
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19750412 199603 1 002

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Target triwulan				Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Sumber Anggaran
					1	2	3	4							Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	Nilai	82.5	0	0	82.5	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100	14,163,221,159	3,375,600,040	25%	3,375,600,032	25%	3,375,600,032	25%	4,036,421,055	25%	
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,5	14,163,221,159	3,375,600,040	-	3,375,600,032	-	3,375,600,032	82,5	4,036,421,055	82,5	
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	99,810,815	-	0%	-	0%	-	0%	99,810,815	100%	
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	Dokumen	8	35,561,645	-	3	-	1	-	2	35,561,645.00	1	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	64,249,170	-	3	-	1	-	1	64,249,170.00	-	
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	9,868,357,810	2,452,714,623	25%	2,452,714,621	25%	2,452,714,621	25%	2,510,213,945	25%	
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	9,810,858,486	2,452,714,623.00	16 orang /bulan	2,452,714,621.00	16 orang/ bulan	2,452,714,621.00	16 orang/ bulan	2,452,714,621.00	17 orang/ bulan	
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	57,499,324	-		-		-		57,499,324.00	3 Dokumen	
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	141,561,298	35,390,326	25%	35,390,324	25%	35,390,324	25%	35,390,324	25%	
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	29,561,298	7,390,326.00	0 Paket	7,390,324.00	0 Paket	7,390,324.00	0 Paket	7,390,324.00	1 Paket	
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	112,000,000	28,000,000.00	4 orang	28,000,000.00	4 orang	28,000,000.00	4 orang	28,000,000.00	4 orang	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	404,325,236	14,656,591	25%	14,656,587	25%	14,656,587	25%	360,355,471	25%	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19,987,536	4,996,884.00	0 Paket	4,996,884.00	0 Paket	4,996,884.00	0 Paket	4,996,884.00	1 Paket	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	113,336,957	-		-		-		113,336,957.00	5 Paket	

										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	16,999,113	4,249,779.00	0 Paket	4,249,778.00	0 Paket	4,249,778.00	0 Paket	4,249,778.00	1 Paket	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	33,833,927	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	33,833,927.00	1 Paket	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3,000,000	750,000.00	0 Dokumen	750,000.00	0 Dokumen	750,000.00	0 Dokumen	750,000.00	1 Dokumen	
										Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	16,650,000	4,162,500.00	0 Paket	4,162,500.00	0 Paket	4,162,500.00	1 Paket	4,162,500.00	1 Paket	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	198,528,000	-		-		-		198,528,000.00	12 Laporan	
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1,989,703	497,428.00	0 Dokumen	497,425.00	0 Dokumen	497,425.00	0 Dokumen	497,425.00	1 Dokumen	
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	24,309,000	6,077,250	25%	6,077,250	5%	6,077,250	25%	6,077,250	25%	
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	24,309,000	6,077,250.00	1 Unit	6,077,250.00	1 Unit	6,077,250.00	2 Unit	6,077,250.00	2 Unit	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3,432,807,500	858,201,875	25%	858,201,875	25%	858,201,875	25%	858,201,875	25%	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	410,000,000	102,500,000.00	3 Laporan	102,500,000.00	3 Laporan	102,500,000.00	3 Laporan	102,500,000.00	3 Laporan	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3,022,807,500	755,701,875.00	3 Laporan	755,701,875.00	3 Laporan	755,701,875.00	3 Laporan	755,701,875.00	3 Laporan	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	192,049,500	8,559,375.00	25%	8,559,375.00	25%	8,559,375.00	25%	166,371,375	25%	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	16,200,000	4,050,000.00	0 unit	4,050,000.00	0 unit	4,050,000.00	0 unit	4,050,000.00	1 unit	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	157,812,000	-		-		-		157,812,000.00	43 unit	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	18,037,500	4,509,375.00	4 unit	4,509,375.00	4 unit	4,509,375.00	4 unit	4,509,375.00	4 unit	

	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Hektare	12829.7	1000	4000	8000	12829.7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Luasan Lahan yang teraliri Irigasi dengan baik	Hektar	13065	78,438,482,593	11,332,495,647	3000 Hektar	11,332,495,622	3000 Hektar	11,332,495,622	3000 Hektar	44,440,995,702	4065 Hektar	
		Persentase luasan banjir	Persentase	82	0	70	80	82			Persentase DAS dalam Kondisi Baik	Persen	19	78,438,482,593	11,332,495,647.00	4%	11,332,495,622.00	4%	11,332,495,622.00	5%	44,440,995,702.00	6%	
											Persentase Panjang Pantai yang Terlindungi	Persen	54	78,438,482,593	11,332,495,647.00	13%	11,332,495,622.00	13%	11,332,495,622.00	14%	44,440,995,702.00	14%	
										Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	352.77 hektar	352.77	53,270,764,458	6,980,837,876	80 Hektar	6,980,837,862	80 Hektar	6,980,837,862	80 Hektar	32,328,250,858	112,77 hektar	
										Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	99,999,900	24,999,975.00	0 Dokumen	24,999,975.00	0 Dokumen	24,999,975.00	0 Dokumen	24,999,975.00	1 Dokumen	
										Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	28	499,996,163	124,999,043.00	7 lembaga	124,999,040.00	7 lembaga	124,999,040.00	7 lembaga	124,999,040.00	7 lembaga	
										Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	10	3,699,998,725	-		-		-		3,699,998,725.00	10 km	
										Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	5	999,998,327	249,999,584.00	1 unit	249,999,581.00	1 unit	249,999,581.00	1 unit	249,999,581.00	2 unit	
										Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	305	7,947,424,856	-		-		-		7,947,424,856.00	305 km	
										Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	0.15	5,099,382,471	1,274,845,620.00	0.10	1,274,845,617.00	0.11	1,274,845,617.00	0.12	1,274,845,617.00	0.15	
										Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	0.37	11,799,661,793	2,949,915,449.00	0.2	2,949,915,448.00	0.25	2,949,915,448.00	0.3	2,949,915,448.00	0.37	
										Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	0.15	499,989,568	124,997,392.00	0.10	124,997,392.00	0.11	124,997,392.00	0.12	124,997,392.00	0.15	
										Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	3	944,963,721	236,240,931.00	0 unit	236,240,930.00	1 unit	236,240,930.00	1 unit	236,240,930.00	1 unit	
										Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0.2	5,099,382,471	1,274,845,620.00	0.1	1,274,845,617.00	0.15	1,274,845,617.00	0.19	1,274,845,617.00	0.2	
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	10	3,099,998,399	-		-		-		3,099,998,399.00	10 Dokumen	
										Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	4	10,599,991,016	-		-		-		10,599,991,016.00	4 unit	

										Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	8	1,879,977,048	469,994,262.00	2 km	469,994,262.00	2 km	469,994,262.00	2 km	469,994,262.00	2 km	
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	500,000,000	125,000,000.00	0 dokumen	125,000,000.00	0 dokumen	125,000,000.00	0 dokumen	125,000,000.00	1 dokumen	
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	500,000,000	125,000,000.00	0 dokumen	125,000,000.00	0 dokumen	125,000,000.00	0 dokumen	125,000,000.00	1 dokumen	
										Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	DI/DIR	88	25,167,718,135	4,351,657,771	22 DI/DIR	4,351,657,760	22 DI/DIR	4,351,657,760	22 DI/DIR	12,112,744,844	22 DI/DIR	
										Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0.07	1,199,738,129	299,934,533.00	0.02	299,934,532.00	0.04	299,934,532.00	0.05	299,934,532.00	0.07	
										Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	0.038	2,599,984,902	649,996,227.00	0.01	649,996,225.00	0.02	649,996,225.00	0.03	649,996,225.00	0.04	
										Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.2	1,344,953,924	336,238,481.00	0.1	336,238,481.00	0.15	336,238,481.00	0.18	336,238,481.00	0.2	
										Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM	5	5,997,038,117	1,499,259,530.00	2	1,499,259,529.00	3	1,499,259,529.00	4	1,499,259,529.00	5	
										Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	Meter	0.5	1,864,992,650	466,248,164.00	0.2	466,248,162.00	0.3	466,248,162.00	0.4	466,248,162.00	0.5	
										Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	10	6,049,867,575	-		-		-		6,049,867,575.00	10 km	
										Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0.5	1,399,959,511	349,989,880.00	0.2	349,989,877.00	0.3	349,989,877.00	0.4	349,989,877.00	0.5	
										Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	1	299,969,142	74,992,287.00	0 bendung	74,992,285.00	0 bendung	74,992,285.00	0 bendung	74,992,285.00	1 bendung	
										Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	6	2,699,994,676	674,998,669.00	1 km	674,998,669.00	1 km	674,998,669.00	2 km	674,998,669.00	2 km	
										Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	4	211,220,509	-		-		-		211,220,509.00	4 Lembaga	
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	4	1,499,999,000	-		-		-		1,499,999,000.00	4 Dokumen	

	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persentase	79.5	15	30	40	79.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Jumlah Rumah Tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan dengan Baik	Rumah Tangga	69933	27,828,941,174	3,752,449,433	11000 Rumah Tangga	3,752,449,431	11000 Rumah Tangga	3,752,449,431	11000 Rumah Tangga	16,571,592,879	36933 Rumah Tangga	
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase	78.5	15	30	45	78.5		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen	82	27,828,941,174	3,752,449,433	20%	3,752,449,431	20%	3,752,449,431	20%	16,571,592,879	22%	
										Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	125	12,209,989,995	-		-		-		12,209,989,995.00	125 unit	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	8	609,153,453	-		-		-		609,153,453.00	8 Dokumen	
										Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1	10,000,000,000	2,500,000,000.00	0 liter/detik	2,500,000,000.00	0 liter/detik	2,500,000,000.00	0 liter/detik	2,500,000,000.00	1 liter/detik	
										Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	200	4,509,797,726	1,127,449,433.00	50 SR	1,127,449,431.00	50 SR	1,127,449,431.00	50 SR	1,127,449,431.00	50 SR	
										Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	10	500,000,000	125,000,000.00	2 unit	125,000,000.00	2 unit	125,000,000.00	3 unit	125,000,000.00	3 unit	
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persentase	79.5	15	30	40	79.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Limbah yang Terkelola dengan Baik	persen	72.62	6,041,000,000		0%		0%		0%	6,041,000,000.00	######	
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase	78.5	15	30	45	78.5		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	persen	82	6,041,000,000		0%		0%		0%	6,041,000,000.00	82%	
										Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	485	6,041,000,000	-	0 Rumah Tangga	-	0 Rumah Tangga	-	0 Rumah Tangga	6,041,000,000.00	485 Rumah Tangga	
	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	58	10	15	35	58	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Drainase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	14.84	21,624,258,666	5,349,999,987	3%	5,349,999,984	3%	5,349,999,984	3%	5,574,258,711	5.84%	
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota	persen	8.132	21,624,258,666	5,349,999,987	2%	5,349,999,984	2%	5,349,999,984	2%	5,574,258,711	######	

										Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	18546	21,399,999,939	5,349,999,987.00	4000 M	5,349,999,984.00	4000 M	5,349,999,984.00	4000 M	5,349,999,984.00	6546 M	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	5	224,258,727	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	224,258,727.00	5 Dokumen	
	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	Persentase	80	10	20	40	80	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Konstruksi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik	persen	80	72,748,795,674		0%		0%		0%	72,748,795,674.00	80%	
										Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase konstuksi Bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik	persen	80	72,748,795,674		0%		0%		0%	72,748,795,674.00	80%	
										Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	32	72,748,795,674	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	72,748,795,674.00	32 Dokumen	
	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	58	10	15	35	58	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	58	193,258,277,988	550,000,002	14%	549,999,999	14%	549,999,999	14%	191,608,277,988	16%	
										Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	193,258,277,988	550,000,002	25%	549,999,999	25%	549,999,999	25%	191,608,277,988	25%	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	15	2,199,999,999	550,000,002.00	3 Dokumen	549,999,999.00	4 Dokumen	549,999,999.00	4 Dokumen	549,999,999.00	4 Dokumen	
										Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	13	6,020,701,516	-	0 jembatan	-	0 jembatan	-	0 jembatan	6,020,701,516.00	13 Jembatan	
										Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	21	43,129,220,454	-	0 km	-	0 km	-	0 km	43,129,220,454.00	21 km	
										Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	338	77,755,954,545	-	0 km	-	0 km	-	0 km	77,755,954,545.00	338 km	
										Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	1	3,686,482,630	-	0 km	-	0 km	-	0 km	3,686,482,630.00	1 km	
										Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	25	4,799,173,974	-	0 jembatan	-	0 jembatan	-	0 jembatan	4,799,173,974.00	25 Jembatan	
										Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	5	20,334,634,937	-	0 jembatan	-	0 jembatan	-	0 jembatan	20,334,634,937.00	5 Jemabatan	
										Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	19	13,036,058,822	-	0 jembatan	-	0 jembatan	-	0 jembatan	13,036,058,822.00	19 Jembatan	

										Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	9	18,496,057,470	-	0 km	-	0 km	-	0 km	18,496,057,470.00	9 Jembatan	
										Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	388	3,799,993,641	-	0 km	-	0 km	-	0 km	3,799,993,641.00	388 km	
	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	Persentase	80	10	20	40	80	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Jasa Konstruksi yang Tertib	persen	60	118,000,000		0%		0%		0%	118,000,000.00	60%	
										Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	persen	60	118,000,000		0%		0%		0%	118,000,000.00	60%	
										Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	10	118,000,000	-	0 Paket Pekerjaan	-	0 Paket Pekerjaan	-	0 Paket Pekerjaan	118,000,000.00	10 Paket Pekerjaan	
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase	90	10	20	40	90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	%	90	2,993,458,578	22,617,142	22%	22,617,141	22%	22,617,141	23%	2,925,607,154	23%	
										Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penetapan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	2,410,704,752	22,617,142	25%	22,617,141	25%	22,617,141	25%	2,342,853,328	25%	
										Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	221,301,560	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	221,301,560.00	1 Dokumen	
										Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	8	1,779,157,279	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	1,779,157,279.00	8 Dokumen	
										Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	1	90,468,565	22,617,142.00	0 publikasi	22,617,141.00	0 publikasi	22,617,141.00	0 publikasi	22,617,141.00	1 publikasi	
										Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	185,911,629	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	185,911,629.00	3 Dokumen	
										Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	1	133,865,719	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	133,865,719.00	1 Laporan	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	479,113,826	-	0%	-	0%	-	0%	479,113,826.00	100%	
										Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	479,113,826	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	479,113,826.00	3 Dokumen	

										Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten	Persen	100	103,640,000	-	0%	-	0%	-	0%	103,640,000.00	100%	
										Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	80	103,640,000	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	103,640,000.00	80 Dokumen	
	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	Persentase	51	10	30	45	51	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Konflik Tanah yang Terfasilitasi	persen	100	1,034,090,419		0%		0%		0%	1,034,090,419	100%	
										Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	1,034,090,419		0%		0%		0%	1,034,090,419	100%	
										Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	474,030,805	-	0 Berita Acara	-	0 Berita Acara	-	0 Berita Acara	474,030,805.00	3 Berita Acara	
										Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	560,059,614	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	560,059,614.00	1 Dokumen	
	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	Persentase	51	10	30	45	51	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Tertib	persen	100	53,235,423		0%		0%		0%	53,235,423.00	100%	
										Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	persen	100	53,235,423		0%		0%		0%	53,235,423.00	100%	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	53,235,423	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	53,235,423.00	1 Dokumen	

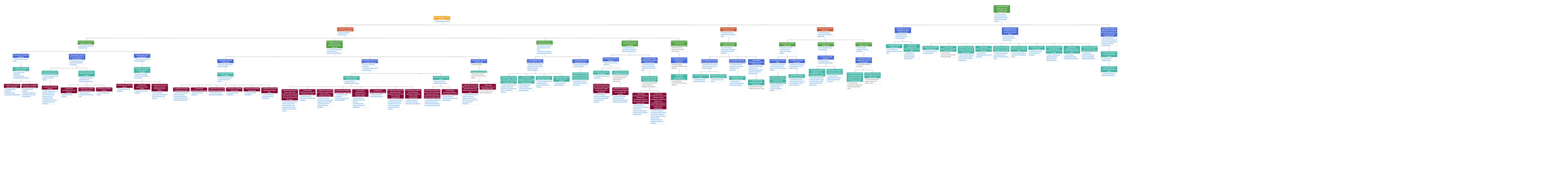

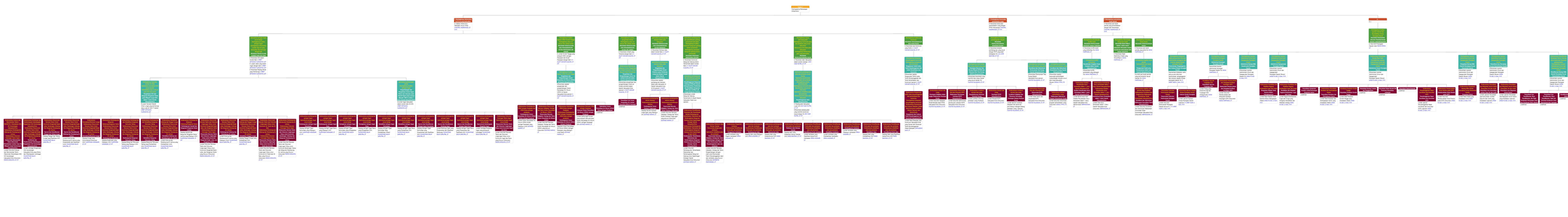

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/233/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/312/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	**A**	**> 80 – 90**	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	**BB**	**> 70 – 80**	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	**B**	**> 60 – 70**	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	**CC**	**> 50 – 60**	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	**C**	**> 30-50**	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	**D**	**>0 – 30**	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,60 dengan predikat **"A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".**

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan

berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	24,6	25,5
b. Pengukuran Kinerja	30	24,6	24,6
c. Pelaporan Kinerja	15	12,3	12
d. Evaluasi Internal	25	20,5	20,5
Nilai Hasil Evaluasi		82	82,6
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

1) Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan kabupaten Tanah Laut, dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

Tabel perbandingan target PK 2025 dan capaian 2024

No	Dokumen Perencanaan	Target
1	Renstra 2024-2026 (tahun 2025)	80,07 (A)
2	Rancangan Renstra 2025-2029 (tahun 2025)	82,5
3	Hasil Evaluasi 2024	82
4	Perjanjian Kinerja tahun 2025	81

2) Penentuan target yang tidak konsisten antar tahun yaitu pada indikator persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Laporan kinerja 2024 target dan realisasi 3% namun pada target Perjanjian Kinerja tahun 2025 82,67%. Sehingga target dari indikator kinerja tersebut tidak menjadi acuan dalam penentuan target kinerja tahun 2025.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

2) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah melakukan efisiensi terhadap anggaran pada sasaran kinerja meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas dengan efisiensi 7,03% namun terdapat target tahun 2024 yang tidak tercapai yaitu:

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	persentase jalan dalam kondisi mantap	57	55,1	96,6%
2	Panjang Jalan kondisi mantap	1552,64	583,48	37,57%
3	Panjang jalan	1826,63	1058,91	57,97%
4	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	98	94,79	96,94%

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan PertanahanTahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja. Pada tahun 2024 terdapat penambahan anggaran untuk program penyelenggaraan jalan sebesar Rp26.229.341.731,00 namun sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat target yang tidak tercapai untuk persentase jalan dalam kondisi mantap dengan capaian 96,6%;

2) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja tahun 2024 indikator nilai SAKIP realisasi 82 nilai, namun pada target PK tahun 2025 hanya 81 nilai.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
b. Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik *(feedback)* dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;

c. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diupload pada Sistem Informasi Smart Office DPUPRP yaitu Aplikasi berbasis web Bernama "ADAFTIF";
2. Perencanaan kinerja telah menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antarbidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkala *(crosscutting)* terutama pada pohon kinerrja dan cascading dalam dokumen perencanaan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	DPUPRP	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,50
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,10
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,00
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,50

4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,60
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

a. Perencanaan Kinerja

1) Penentuan target Perjanjian Kinerja 2025

Renstra 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026								
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	Nilai Sakip DPUPRP	72,60 (BB)	80.05 (A)	80.06 (A)	80.07 (A)	81 (A)

Rancangan Renstra 2025-2029

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Pemerataan infrastruktur	Meningkatnya pembangunan Infrastrurktur ke PU an yang berkualitas			Indeks Infrastruktur Daerah	49,55	54,21	55	57	59	60	60	
		1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	55,1	57	58	59,5	61,0	62,5	64,0	
		2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	12446,383	12.829,70	13.065,99	13.129,00	13.319,78	13.503,56	13.669,84	
				Persentase luasan banjir	84,2	82,00	80,50	80,00	79,60	79,20	78,80	

		3	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	78,67	79,5%	80,4%	81,3%	82,1%	83,0%	83,9%	
				Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	75,02	78,5%	78,9%	79,5%	80,1%	80,9%	81,6%	
		4	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	80	80	80	80	80	80	80	
		5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	99,91	90	95	94	95	96	97	
		6	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	50	51	51	52	52	53	53	
		7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	

Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024

4. Hasil evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,00 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa impleinentasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

PK 2025 belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya

Perjanjian Kinerja tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Mengingkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58%
2	Meningkatnya kinerja tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
3	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	12796,443 Hektar
		2	Persentase luasan banjir	82,2
4	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	82,67%
		2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	97,02%
5	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	80%
6	Meningkatnya kesesuaian pemafaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	90%
7	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	51.00%

2) Kesesuaian target kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Mengingkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58%
2	Meningkatnya kinerja tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
3	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	12796,443 Hektar
		2	Persentase luasan banjir	82,2
4	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	82,67%
		2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	97,02%
5	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	80%
6	Meningkatnya kesesuaian pemafaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	90%
7	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	51.00%

Tabel 3.4
Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP
(Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	57 %	55,1%	96,6%
2	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82	102,5
3	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	12446.383 Hektar	12.446,383	100
		2	Persentase luasan penanganan banjir	84,20 %	81.60 %	103,19
4	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	3 %	3%	100
		2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	3 %	3%	100
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah.	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	50 %	50%	100
6	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	80 %	80	100
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	85,47	99,91	116.89

b. Pengukuran Kinerja

1) *Feedback* Kinerja

Umpan balik yang di rekomendasikan berupa narasi yang membangun

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

DPUPRP
KAB.TANAH LAUT
KERJA KITA, PRESTASI BANGSA

LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

©Subbag Perencanaan 2026